

Berbicara tentang sosiologi adalah sama dengan berbicara tentang salah satu karya agung Allah swt. yang bernama MANUSIA karena cakupan bahasan ilmu sosiologi itu sama unik dan luasnya dengan karakter dan perilaku manusia yang terkadang menjadi sangat enigmatis.

Buku Bunga Rampai Sosiologi yang sekarang sudah hadir di tengah pembaca ini mencoba mengangkat beberapa isu *socio-cultural* yang sering kali terjadi dan mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak pernah habis dan selesai dibicarakan mulai dari perkembangan Ilmu Sosiologi, isu penyimpangan sosial dari sudut pandang agama, perubahan perilaku masyarakat, teori-teori pendekatan sosial, meneladani moralitas berpolitik Rasulullah sampai dengan masalah potensi konflik sosial dalam pesta demokrasi (Pemilu).

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam pengembangan ilmu sosiologi baik secara teoritis maupun aplikatif/terapan sehingga ilmu sosiologi itu tidak hanya berguna hanya sebagai ilmu saja, tetapi dapat menjadi sebagai *added value* dlm meningkatkan kecerdasan sosial umat, bangsa dan negara sebagai makhluk Allah terbaik dan dipilihNya sebagai Khalifah atau pemimpin dan pengelola alam semesta raya ini.



Jl. Ar-Raniry No. 1
Komplek Pascasaraja
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



BUNGA RAMPAI

Sosiologi

2022

GUNAWAN ADNAN - FAUZI ISMAIL



**GUNAWAN ADNAN
FAUZI ISMAIL**

BUNGA RAMPAI

Sosiologi 2022



GUNAWAN ADNAN

FAUZI ISMAIL

AR-RANIRY PRESS

2022

BUNGA RAMPAI SOSIOLOGI 2022

Copyrught 2022 © Gunawan Adnan dan Fauzi Ismail

All right reserved

Editor: Warul Walidin

ISBN : 978-623-7410-99-7

ix + 127 hal. 15,5 x 23 cm

Layout isi/Cover : Eka Saputra

Cetakan pertama: Januari 2022

Penerbit:

Ar-Raniry Press

Jl. Ar-Raniry. Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan, kesempatan, waktu luang sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah tercinta, Nabi Muhammad Saw, yang dari beliau kita belajar tentang pentingnya ilmu dan amal dalam mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat. Buku ini penulis beri Judul "Dalam Cermin Sosiologi Agama: Problematik dan Solusi. Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis yang merangkum berbagai tema penting dalam kajian sosiologi dan sosiologi agama. Buku ini sangat layak dijadikan referensi karena menyajikan beberapa problematika dalam kajian sosiologi berikut solusi yang diberikan oleh para sosiolog. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang multi interdisipliner, karena cakupannya yang sangat luas dan merambah berbagai bidang ilmu lainnya. Untuk itu kajian dalam sosiologi dan sosiologi agama akan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Buku ini juga

diharapkan dapat menambah referensi buku-buku sosiologi dan sosiologi agama khususnya dikalangan PTKIN dan masyarakat secara umum, agar lebih mudah memahami tentang sosiologi. Penulis menyadari bahwa ada banyak buku-buku sosiologi dan sosiologi yang sudah ditulis akan tetapi di dalam buku ini penulis lebih fokus untuk memberikan pemahaman tentang isu-isu penting terkait dengan nuansa masyarakat dalam dimensi agama, politik, dan sosial.

Di setiap bab dalam buku ini menampilkan pembahasan yang dimulai dari perkembangan sosiologi dan sosiologi agama, awal dalam kajian sosiologi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang Perspektif agama terhadap penyimpangan Sosial, diteruskan dengan kajian tentang perubahan perilaku Keagamaan dalam Masyarakat di Era Moderen. Pada Bab selanjutnya penulis menguraikan tentang Teori Fungsional Emile Durkheim dalam memahami konsep beragama masyarakat moderen, berikutnya penulis menampilkan gambaran tentang kajian sosio religius masyarakat dalam membina moral politik Nabi Muhammad Saw. Pada Bab terakhir buku ini penulis menyajikan informasi tentang Potensi Konflik sosial di pemilu.

Sejatinya Buku ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi tentang dinamika kehidupan masyarakat dalam konteks kekinian. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya dapat menghadirkan realitas komprehensif dari seluruh persoalan sosiologi dan sosiologi agama yang tentunya

sangat luas dan tidak terbatas untuk dibahas, sehingga sangat memungkinkan untuk diteruskan oleh penulis berikutnya.

Menutup kata pengantar ini penulis sampaikan terima kasih kepada semua teman sejawat, para akademisi dan kolega dari berbagai profesi, karena dari diskusi-diskusi yang kita lakukan, penulis memiliki ide untuk dapat mengabadikan tulisan ini dalam bentuk buku. Terima kasih juga untuk isteri tercinta dan anak-anak penulis yang sangat penulis cintai, karena sudah bersabar dengan segala kesibukan penulis. Akhir kata hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri seraya memohon agar buku ini dapat menjadi amal salih penulis yang penulis berikan sebagai bentuk pencerahan bagi semua insan yang berminat pada ilmu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
1. PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DARI ZAMAN KLASIK KE ZAMAN MODERN	1
A. Pendahuluan	1
B. Sosiologi Pada Abad Kesembilan Belas (Klasik).....	2
C. Sosiologi di Abad 20 (Modern).....	5
D. Sosiologi di Abad Kedua Puluh Satu (Kontemporer).....	7
E. Penutup	13
DAFTAR PUSTAKA	14
2. PERSPEKTIF AGAMA TERHADAP PENYIMPANGAN SOSIAL	21
A. Pendahuluan	21
B. Agama Menurut Pandangan Tokoh	24
C. Hubungan Agama Dan Kehidupan Sosial.....	25
D. Perspektif Agama Terhadap Penyimpangan Sosial.....	28
E. Tantangan dan Peluang Agama dalam Menghadapi Penyimpangan Sosial.....	32
F. Penutup	34
DAFTAR PUSTAKA	35
3. PERUBAHAN PERILAKU KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT DI ERA 4.0	41
A. Pendahuluan	41
B. Perilaku Keagamaan	45

C. Perubahan Yang Mungkin dan Dapat Terjadi.....	48
D. Pengaruh 4.0 Terhadap Perubahan Perilaku Keagamaan.....	50
E. Tantangan Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Teknologi 4.0.....	52
F. Penutup	57
DAFTAR PUSTAKA	60
4. PENDEKATAN TEORI FUNGSIONAL EMILE DURKHEIM DALAM MEMAHAMI KONSEP BERAGAMA MASYARAKAT MODERN.....	63
A. Pendahuluan	63
B. Pengertian Teori Fungsional.....	67
C. Peran Teori Fungsional Emile Durkheim Dalam Memahami Agama.....	69
D. Konsep Beragama Masyarakat Modern.....	73
E. Fungsionalisme dan Struktualisme Dalam Lembaga Agama.....	76
F. PENUTUP	79
DAFTAR PUSAKA	80
5. MEMBUMIKAN MORAL BERPOLITIK NABI MUHAMMAD DI ERA 4.0: SUATU KAJIAN SOSIO RELIGIUS	83
A. Pendahuluan	83
B. Moral Berpolitik Nabi Muhammad.....	85
C. Ketika Nabi Muhammad Berpolitik	88
D. Berpolitik di Era 4.0	91
E. Membumikan Moral Berpolitik Nabi Muhammad	94
F. Penutup	99
DAFTAR PUSTAKA	100
6. POTENSI KONFLIK SOSIAL DI DALAM PEMILU	107
A. Pendahuluan	107
B. Pemilu dan konflik sosial	111
C. Indonesia dengan kemajemukannya	113
D. Politik Identitas Sumber Konflik Di Pemilu	116
E. Tingkat Literasi Masyarakat	119

F. Pentingnya Pendidikan Politik.....	122
G. Penutup	125
DAFTAR PUSTAKA	127

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI DARI ZAMAN KLASIK KE ZAMAN MODERN



GUNAWAN ADNAN

A. Pendahuluan

Sosiologi terkait erat dengan isu-isu dunia yang paling mendesak. Kami juga telah mempelajari berbagai bidang ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan sosiologi adalah pendekatan terbesar untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat saat ini karena sosiologi dalam ilmu sosial adalah pengetahuan yang terus berkembang tanpa kita memahaminya.

Sosiologi mengambil pendekatan ilmiah dan metodis untuk masyarakat. Sebelum sosiologi, tidak ada upaya sistematis dan ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan orang-orang dalam semua seluk-beluknya. Sosiologi menyelidiki berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat untuk menjelas-kannya secara rasional, ilmiah,

dan menggunakan metodologi penelitian sosial tertentu dalam penelitian.

Zaman modern saat ini, masalah kebudayaan dapat berpengaruh dalam menggerakkan pemikiran orang banyak seperti para ahli pendidikan, di mana-mana selalu menghadapi masalah. Dalam setiap kasus, kekuatan budaya muncul sebagai aspek tak terelakkan yang harus dipertimbangkan agar upaya ini berhasil. Orang mencari motivasi dan insentif untuk mendukung pertumbuhan masyarakat dari dalam budaya (Bahar & Teng, 2017).

B. Sosiologi Pada Abad Kesembilan Belas (Klasik)

Sejarah perkembangan sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu dimulai pada abad ke-19 di Eropa Barat, setelah Revolusi Politik di Perancis dan Revolusi Industri di Inggris. Namun, sebelum menggali lebih dalam sejarah evolusi sosiologi, perlu dicatat bahwa studi tentang masyarakat telah ada selama berabad-abad sebelum nama sosiologi diciptakan. Plato dan Aristoteles, dua filsuf Yunani terkenal yang menerbitkan buku tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil dan bahagia, menunjukkan hal ini. Lalu ada Ibn Khaldun, seorang cendekiawan/filsuf Muslim yang menulis pada abad ke-14 tentang integrasi sosial dan peradaban manusia. Jadi, jauh

sebelum istilah "sosiologi" diciptakan, ketiga buku luar biasa ini sudah ada (Taufik, 2018).

Dari segi linguistik, sosiologi terdiri dari dua suku kata: kata Latin *socius*, yang berarti teman, dan kata Yunani *logos*, yang berarti pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu sosial yang menyelidiki interaksi sosial manusia dalam masyarakat dalam kaitannya dengan struktur sosial, menurut definisinya. Ini tampak abstrak dan luas dalam konteks sosiologi, namun ilmu ini telah digunakan oleh siapa pun secara tidak sadar berkali-kali. Dengan kata dasar, sosiologi dapat dibandingkan dengan sepasang kacamata yang membantu membedakan ciri-ciri orang atau anggota kelompok sosial tertentu. Sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek keberadaan manusia, komponen sosial berkembang secara dramatis (Safa'at, 2002).

Sosiologi didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari banyak aspek masyarakat. Mulai dari perilaku, tindakan, ikatan sosial timbal balik, dinamika, kelompok masyarakat, institusi, struktur, dan berbagai topik lainnya, ada beberapa topik yang dapat diteliti. Akibatnya, sosiologi memiliki sejarah yang panjang dan konsisten hingga saat ini. Filsuf seperti John Locke, Philosopher, dan Jean Jacques Rousseau menulis tentang bagaimana mengatur orang untuk hidup dalam harmoni di bawah bentuk pemerintahan yang dikenal sebagai 'kompak sosial' selama periode Pencerahan awal di Eropa Barat. Akibatnya, jika sosiologi didefinisikan

sebagai studi tentang masyarakat, itu sudah ada sejak Yunani Kuno. Auguste Comte, seorang filsuf Perancis, menciptakan kata sosiologi dalam karyanya tahun 1838 *Course DE Philoshopie Positive*. Filsuf Auguste Comte, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi, menciptakan kata sosiologi. Selama Revolusi Prancis dan era Napoleon, Comte hidup (Roswantoro, 2015).

Kehidupan sosial yang stabil, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Revolusi Industri semuanya menyebabkan perubahan di antara populasi Eropa pada periode itu. Evolusi pengetahuan manusia telah menghasilkan hubungan sebab akibat, karena berakar pada ide-ide para filsuf seperti Comte, yang percaya bahwa analisis ilmiah dapat digunakan untuk mengungkapkan aturan yang mengatur aktivitas sosial manusia, sosiologi dapat pecah dan tumbuh dengan caranya sendiri. Pengertian positivisme dalam sosiologi berkembang dari filsafat Comte sebagai teknik untuk menjelaskan dunia sosial berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Positif di sini mengacu pada segala sesuatu yang wajar, empiris, dan dapat diuji dengan menggunakan kaidah ilmiah lainnya (Priyanto, 2021).

Sebelum Revolusi Prancis, pemerintahannya adalah teokrasi, dengan kaisar sebagai wakil Tuhan dan tidak bersalah atas perilaku sewenang-wenang rakyat Prancis. Penjara Bastille, yang menjadi simbol kekejaman pemerintah dan dihancurkan oleh rakyat, diubah menjadi pencerahan dan pemikiran logis untuk mencapai kekayaan kolektif. Pada tahap

awal pertumbuhan ilmu pengetahuan, para pendiri menghabiskan waktu lama mencari arah yang benar untuk bidang studi baru. Karena berbagai peristiwa sejarah yang membentuk peradaban manusia, sesuatu yang tidak biasa terjadi pada awal kelahiran sosiologi di abad ke-19. Misalnya, sepanjang abad ke-18 dan 19, revolusi politik di Prancis mengalihkan perhatian sosiologi ke konstruksi keteraturan dan transformasi sosial. Kemudian datanglah Revolusi Industri, yang menandai dimulainya kapitalisme dan sosialisme dan berdampak pada sosiologi. Kedua peristiwa penting ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap evolusi, perkembangan, dan dampak kehidupan sosial.

C. Sosiologi di Abad 20 (Modern)

Pada awal abad kedua puluh, sosiologi di Amerika Serikat mulai berkembang pesat dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang paling diminati. Urbanisasi dan industrialisasi besar-besaran yang terjadi di kota-kota Amerika, menghasilkan transformasi sosial yang signifikan, menginspirasi para ilmuwan Amerika. Kemudian muncullah penciptaan kota-kota besar, industri besar, dan gelombang besar migrasi, yang semuanya mengarah pada urbanisasi, yang membawa pergolakan dan transformasi sosial yang besar dan rumit. Perubahan masyarakat mendorong para ilmuwan untuk mencari solusi sosiologis. Metode sosiologis ini bersifat makro (empiris), mengandung pengertian bahwa perubahan-

perubahan dalam masyarakat dapat diselidiki dengan melihat realitas-realitas sosial yang muncul (Utomo Harmantyo, 2021).

Ekspansi populasi yang cepat, munculnya kota-kota industri baru, peningkatan kejahatan, dan efek lainnya dihasilkan dari gelombang besar imigrasi yang membanjiri Amerika Utara pada awal abad kedua puluh. Perubahan sosial yang besar tidak dapat dihindari sebagai akibat dari kerusuhan sosial. Transformasi sosial ini, khususnya, dapat mendorong para ilmuwan sosial untuk merenungkan dengan hati-hati dan menyimpulkan bahwa metode sosiologis dalam gaya Eropa lama tidak lagi relevan, mendorong mereka untuk mencari strategi baru yang lebih sesuai dengan situasi sosial saat ini (A. Sulaiman, 2016).

Pesatnya pertumbuhan sosiologi di Amerika Serikat tidak berarti bahwa sejarah perkembangan sosiologi di Eropa Barat telah berakhir. Soap Weber, seorang filsuf Jerman, menantang teknik ilmiah sosiologi yang muncul pada abad kesembilan belas. Pendekatan ilmiah alamiah, menurut Weber, tidak dapat diterapkan pada ilmu-ilmu sosial karena ilmu sosial menjadikan manusia sebagai subjeknya, sehingga tidak ada subjektivitas dalam ilmu sosial. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam, yang sangat menekankan objektivitas. Akibatnya, Weber mengu-sulkan bahwa sosiologi harus terlibat dalam perilaku sosial subjektif dan mempelajari masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah ciri-ciri sosiologi pada abad kedua puluh: Memiliki keunikan seperti interaksi dengan

manusia, mampu merumuskan hipotesis sosial, Mampu mengembangkan strategi sosiologis yang unik untuk kemajuan sosiologi, Karena tidak mendasarkan dan memperhatikan masukan sosio-logis, sosiologi menjadi lebih signifikan seiring dengan meningkatnya angka kegagalan pemanfaatan (Tualeka, 2017).

Salah satu kelemahan sosiologi di penghujung abad XX yang masih dianggap tertinggal adalah juga dapat diselesaikan saat ini, yaitu dalam kaitannya dengan perkembangan dan masalah saat ini di dunia serta interaksi manusia yang dapat diselesaikan. terlihat adalah interaksi tidak langsung melalui telepon, internet, media sosial, dan lain-lain yang menghubungkan orang-orang yang berjauhan (Roswantoro, 2015). Mendekati abad kedua puluh satu, postpositivisme, postmodernisme, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan sekolah sosiologi post-label lainnya tanpa henti menyerang sosiologi sebagai ilmu (Rosana, 2011).

D. Sosiologi di Abad Kedua Puluh Satu (Kontemporer)

Dalam sejarah perkembangan sosiologi pada abad kedua puluh satu, semakin banyak aliran pemikiran dan disiplin ilmu, seperti Saint George Ritzer, yang sebelumnya merumuskan sosiologi sebagai ilmu dengan banyak paradigma, menyiratkan bahwa cara pandang sosiologi tidak

tunggal. dan bahwa sosiologi secara historis merupakan ilmu yang luas (Tualeka, 2017).

Abad baru menetapkan sosiologi sebagai disiplin yang cair dan komprehensif dengan fokus pada perubahan struktur sosial dalam konteks urbanisasi, industrialisasi, wilayah pedesaan dan perkotaan, serta fitur dinamis masyarakat modern. Sosiologi pada abad kedua puluh satu dikenal sebagai sosiologi kontem-porer. Munculnya disiplin ilmu dalam bidang sosiologi dapat dianggap sebagai tanda meluasnya ruang lingkup sosiologi. Sosiologi Digital, Sosiologi Pariwisata, Sosiologi Pemuda, Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Olahraga, Sosiologi Sastra, Sosiologi Hukum, Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Gender, dan bentuk-bentuk sosiologi modern lainnya kini mulai populer (Puspitasari, 2018).

Sejarah evolusi sosiologi di era modern cenderung mengabaikan pentingnya hukum alam dalam ilmu-ilmu sosial. Sekarang, terlepas dari premis awal Comte, institusi ilmu sosial di seluruh dunia mulai mengajarkan sosiologi, membuat orang seperti fisikawan Michel, Bourdieu, dan Slavoj Zizek lebih diminati daripada Auguste Comte dan Durkheim (Barnwell, 2018).

Sosiologi di abad kedua puluh satu adalah sosiologi, karena merupakan disiplin yang sangat cair dan komprehensif yang mempelajari tidak hanya perubahan struktur sosial dalam konteks industrialisasi, urbanisasi, daerah pedesaan dan perkotaan, tetapi juga fitur dinamika sosial modern.

kontemporer. Sosiologi adalah ilmu sosial yang menyelidiki interaksi sosial antara individu, kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat. Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak pernah jauh dari interaksi sosial, karena setiap hubungan, menurut definisi, mempengaruhi perilaku orang. Indonesia, sosiologi telah mengalami kemajuan (A. Sulaiman, 2016).

Sekalipun sosiologi hanya sebatas pengetahuan dan belum menjadi suatu disiplin ilmu yang otonom, sosiologi telah ada dan berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu, sebagaimana ditunjukkan oleh ajaran para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia yang memuat bagian-bagian sosiologi dalam karya-karyanya. Ajaran Jawa "Wulang Reh" yang diajarkan oleh Paduka Mangkunegoro IV, misalnya, telah mencakup komponen hubungan manusia dalam beberapa kelompok yang berbeda. Kasus ini menunjukkan bahwa pengetahuan sosiologis sebelumnya telah diproduksi dan dikenal di Indonesia pada saat itu. Proses selanjutnya, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, mengembangkan pengertian sosiologis yang signifikan seperti kepemimpinan dan kekeluargaan, yang dijadikan landasan pendidikan nasional Indonesia dalam proses pendidikan Taman Siswa (Barnwell, 2018).

Menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sosiologi bangsa mengalami transformasi yang luar biasa. Soenarjo Kolopaking, guru besar Akademi Ilmu

Politik Yogyakarta, adalah orang pertama yang mengajar sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948. (sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta). Sejak tahun 1950, ketika mahasiswa Indonesia mendapat kesempatan yang lebih besar untuk belajar di luar negeri, sosiologi akhirnya mulai menarik perhatian para akademisi di Indonesia. Alhasil, banyak pelajar Indonesia yang mempelajari sosiologi dan kemudian mengajarkannya saat mereka kembali ke rumah (Muchith, 2012).

Djody Gondokusuma menulis buku sosiologi pertama di Indonesia berjudul Sosiologi Indonesia, yang memberikan beberapa pemahaman mendasar tentang sosiologi. Buku ini membantu banyak mahasiswa, serta masyarakat umum, dalam memahami perubahan (revolusi) yang cepat yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat itu. Menyusul terbitnya buku pertama, sederet buku sosiologi, baik yang diproduksi oleh orang Indonesia maupun terjemahan karya internasional, mulai bermunculan (Dr. Murdiyanto, 2020).

Selain itu, di perguruan tinggi lokal, beberapa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik telah terbentuk, mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Hingga akhirnya kami diperbolehkan belajar sosiologi di mana saja saat ini. Pembentukan paradigma bahwa pertumbuhan pembangunan suatu bangsa tidak hanya diukur dalam pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya alam, tetapi yang jauh lebih penting adalah pembangunan

sumber daya manusia telah menjadi bab penutup dalam sejarah sosiologi sebagai ilmu (Sumber daya manusia). Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu, dalam pandangan ini, pada akhirnya memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang muncul (M. Rasyid Ridla, 2012).

Sebagai makhluk sosial yang terus-menerus berinteraksi dalam masyarakat, sosiologi menyelidiki banyak interaksi yang dibentuk orang sebagai anggota masyarakat agar hubungan tersebut berfungsi dengan lancar, teratur, dan mencapai tujuan yang diperlukan, norma, dan tradisi berfungsi sebagai pengatur dan standar bagi perilaku anggota masyarakat. Namun, sangat tidak lazim jika kegiatan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan standar masyarakat menghasilkan perilaku menyimpang dan perselisihan di antara anggota masyarakat .

Tujuan utama sosiologi adalah untuk mengha-silkan informasi yang objektif tentang fenomena sosial dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Orang yang hidup berkelom-pok dan berinteraksi satu sama lain, berkembang sebagai individu yang intelektual dan terpelajar, sehingga masyarakat bersifat dinamis daripada stagnan (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Indonesia saat ini adalah keadaan masyarakat yang cukup luar biasa karena di satu sisi mereka sangat kekinian dan mengetahui teknologi yang canggih, namun di sisi lain mereka

masih sangat terbelakang dan tidak mengenal teknologi. Dari segi geografis, ada individu yang tinggal di kota-kota besar dengan segala fasilitasnya, dan ada juga yang tinggal di tempat terpencil. Kesulitan sosial akan muncul jika proses transformasi budaya tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Ketidakesesuaian komponen dalam masyarakat disebut sebagai masalah sosial. Kemiskinan (kurangnya pendidikan, pekerjaan yang tidak memadai, keterampilan rendah, dan sebagainya), perilaku menyimpang, kejahatan, masalah kependudukan, pelanggaran moral dan norma, dan sebagainya adalah contohnya dari masalah yang (A. Sulaiman, 2016).

Masalah sosial dapat diselesaikan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep sosiologis yang dapat digunakan di semua lapisan masyarakat. Peran sosiologi dalam menangani masalah sosial adalah untuk meneliti interaksi sosial dalam masyarakat, kemudian konflik sosial dan bagaimana menyelesaikannya, mempelajari dan memantau perubahan sosial dalam masyarakat, dan menawarkan penjelasan kepada semua lapisan masyarakat bahwa setiap orang berbeda dan unik. Selanjutnya, sosiologi bertanggung jawab untuk melakukan studi sosiologis tentang peristiwa terkini di masyarakat (Sandra, 2013).

Sosiologi, sebagai ilmu sosial, memainkan peran penting dalam upaya untuk mengatasi masalah sosial. Dalam studi sosiologis, bahkan inisiatif untuk memperbaiki masalah sosial diperiksa secara mendalam. Akibatnya, sosiologi mengusulkan

pendekatan sosial yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini. Selain itu, teknik dan analisis masyarakat tidak mampu mengikuti perubahan cepat yang terjadi.

Sebagai strategi represif dan preventif, sosiologi penting untuk menawarkan umpan balik dan dukungan kepada masyarakat dalam menangani masalah sosial. Dengan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat, proses pertumbuhan suatu negara mungkin sederhana dan berkelanjutan.

E. Penutup

Sebagai makhluk sosial yang terus-menerus berinteraksi dalam masyarakat, sosiologi menyelidiki banyak interaksi yang dibentuk orang sebagai anggota masyarakat agar hubungan tersebut berfungsi dengan lancar, teratur, dan mencapai tujuan yang diperlukan. , norma, dan tradisi berfungsi sebagai pengatur dan standar bagi perilaku anggota masyarakat. Namun, sangat tidak lazim jika kegiatan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan standar masyarakat menghasilkan perilaku menyimpang dan perselisihan di antara anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim. (2002). *Fiqh Siyarah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al- Qur'an*. 2002.
- Amin, S. (2017). Identitas Politik Islam Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin. 2017.
- Bahar, H. M., & Teng, A. (2017). Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). 5(1), 2354–7294.
- Barnwell, A. (2018). Durkheim as affect theorist. *Journal of Classical Sociology*, 18(1), 21–35. <https://doi.org/10.1177/1468795X17702917>
- Bernard Raho. (2007). *Bernard Raho.pdf*.
- Buana, R. D. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Chairi, A. N. (2017). PERSPEKTIF AGAMA ISLAM TERHADAP KELUARGA SEHAT DI KOTA MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI JAMBI TAHUN 2017. 6(01).
- Dadang Kahmad. (2009). *Sosiologi Agama*. 2009.
- Dany Haryanto, S. . dan G. E. N. (2011). Dany Haryanto, S.S dan G. Edwi Nugroho, (2011). Pengantar Sosiologi Dasar , (Jakarta: PT. Prestas Pustakarya. 2011.
- Daroeso, B. (1986). Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila, Semarang: Aneka Ilmu, 1986. 1986.
- Dr. Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa.

- Dwi Narwoko. (2007). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. 2007.
- Elly M. Setiadi. (2011). Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi., Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Elly M. (2011). Pengantar Sosiologi.
- Elvandi, M. (2010). Muhammad Elvandi, Lc.
- Erfan Gazali. (2018). Pesantren Di antara. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9.
- Eva Rosyida. (2019). Eva Rosyida, 2019. e-Modul Sosiologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2019.
- Fauzi. (2017). *Fauzi.pdf*.
- Firmansyah, Iman, M. (2019). Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 79–90.
- Giddens, A. (1991). *Anthony_Giddens.pdf*.
- Gunawan Adnan. (2020). Gunawan Adnan, Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020). 2020.
- Haboddin, M. (2012). Muhtar haboddin, (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal . *Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No. 1. 3(1)*, 2012.
- Hamali, S. (2017). Agama Dalam Perspektif Sosiologis. 12, 2017.
- Hamzah Ya'kub. (1993). *Hamzah.pdf*.
- Hemafitria. (2015). Hemafitria. (2015). Pembelajaran pkn sebagai pendidikan politik pemilih pemula . *Edukasi*, 13(2). 13, 2015.
- Imran, A. (2015). PERANAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT. *Hikmah*, 2(1), 23–39.

- Jasiman, R. D. (2012). Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat. 2012.
- Joko Santosa. (2019). Pendidikan Agama Islam. *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan*, 2(25), 64–88.
- Kuntowijoyo. (1991). *Kuntowi.pdf*.
- M. Rasyid Ridla. (2012). SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *AL-Ihkam*, 7(2), 294–304.
- Maloko, M. T. (2013). Etika Politik dalam Islam, dalam *Jurnal Al-Daulah*. 1(2), 2013.
- Mubasyaroh. (2018). Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam. 1(2), 2018.
- Muchith, M. S. (2012). Islam Dan Filosofi Auguste Comte.
- Munir Fuady. (2013). *munir fuady.pdf*.
- Mushfi, M. (2020). *Modernisasi Pendidikan*. 2507(February), 1–9.
- Nadir. (2019). *Membangun Pendidikan*. 3(1), 1–9.
- Nanang Martono. (2016a). *Nanang.pdf*.
- Nanang Martono. (2016b). *Sosiologi Perubahan Sosial*.
- Nurdin, M. F. (2017). Sosiologi Kontemporer: Filsafat Dan Orientasi. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15267>
- Nurrohman. (2011). Politik Islam dalam Cita dan Realita.
- Priyanto, E. (2021). Peningkatan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Tematik Melalui Supervisi Akademik. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v8i1.1077>
- Puspitasari, R. (2018). Revousi Perancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme Dan Demokrasi Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji Dan Dampaknya Di Dalam Dan

- Luar Negeri. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2–22.
- Qardhawi, Y. al. (2008). Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah. 2008.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *TAPIS*, 7 (12), 1–30.
- Rosman, E. (2015). Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.
- Roswanto, A. (2015). Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles. In *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* (Vol. 15, Issue 2, pp. 123–138).
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Safa'at, M. (2002). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls). November, 1–13.
- Sandra, L. J. (2013). Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur Dki Jakarta 2012 Di Media Sosial Twitter. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2).
- Saputra, H. E. R. (2019). PLURALISME AGAMA: STUDI TENTANG MAKNA DAN POLA KOMUNIKASI ANTAR UMAT ISLAM, HINDU DAN BUDHA DI PULAU LOMBOK. KOTA MATARAM. XI(1).
- Setyaningrum, A. (2005). Setyaningrum, Arie, (2005), Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas , (Mandatory, Journal Institute for Research and Empowerment (IRE), vol. 2, no. 2. 2(2), 2005.
- Soerjono Soekanto. (1999). *Soerjono Soekanto.pdf*
- Soerjono Soekanto. (2003). *soerjono.pdf*

- Sukardi, I. (2003). *Imam sukardi.pdf*.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Sulaiman, M. (2019). *Makna Agama*.
- Suwanto dan Rahmat Hidayat. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. 3(2), 2020.
- Syaid, M. N. (2019). Penyimpangan sosial dan pencegahannya.
- Syam, M. B. (2018). Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Aqidah-Ta UIN Alaudin Ujung Pandang*, IV(2), 198–213.
- Syarifuddin Jurdi. (2010). Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern. 2010.
- Taufik, M. (2018). Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(1), 27–45. <http://202.0.92.5/ushuluddin/ref/article/view/1855>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Utomo Harmantyo. (2021). Dekolonisasi Ilmu Sosial di Global Selatan; Kritik Southern Theory dan Epistemologies of the South terhadap Kanon Sosiologi Modern di Indonesia. 2021.
- Wahono, S. (2000). Satrio Wahono, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi, (Bandung: Mizan & Serambi Ilmu Semesta, 2000). 2000.
- Wibisono, Y. (2020). *M. Yusuf.pdf*.
- Wiranata, R. S. (2016). *Tantangan Prospek dan peran pesantren*. 8(July), 1–23.

Yusak, Y. (2003). Yulius Yusak, (2003). Kemajemukan dan konflik Sosial. *Jurnal PsikoWacana* Vo. II No. 2, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 2, 2003.

Zakiah Darajat. (1982). *zakiah.pdf*

Zawawi, A. (2015). *Politik dalam Pandangan Islam*. 5(1), 2015.

PERSPEKTIF AGAMA TERHADAP PENYIMPANGAN SOSIAL



GUNAWAN ADNAN

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya setiap manusia mendambakan kehidupan yang sehat, tenteram, dan bahagia, mes-kipun keinginan tersebut tidak selalu terwujud dengan sempurna. Islam adalah agama yang sangat peduli dengan kehidupan manusia, karena itulah sebabnya Islam mengendalikan semua elemen keberadaan manusia dengan gagasan yang sangat spesifik dan menegaskan hak manusia untuk hidup sehat. Hidup sehat adalah hidup di mana seseorang memiliki kepribadian yang kuat, tingkat dorongan dan harapan yang tinggi, dan keberadaan serta kenyamanan untuk berhasil dalam hidup.

Sosiologi agama menitik beratkan kajiannya kepada masyarakat beragama, bukan pada kebenaran ajaran agamanya. Agama yang dimaksud dalam so-siologi merupakan agama dalam perwujudan dan tindakan masyarakat manusia. Ilmu sosiologi dalam perspektif agama dapat didefinisikan sebagai studi tentang kehidupan sosial umat beragama dalam aturan hidup bermasyarakat. Ilmu ini juga membahas kehidupan masyarakat, perilaku sosial keagamaan, dan produk kehidupan umat beragama. Sosiologi Agama difokuskan pada masalah sosial-keagamaan skala besar dan signifikan dalam kerangka budaya yang lebih besar, daripada masalah yang terjadi didalamnya (M. Rasyid Ridla, 2012).

Penyimpangan sosial pada umumnya ditautkan dengan hal-hal yang negatif. Dalam norma agama tindakan gantung diri merupakan salah satu contoh penyimpangan sosial, karena dalam pandangan norma agama bagian dari peraturan hidup yang harus diterima manusia, ditetapkan sebagai perintah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dipusatkan bagi umat manusia agar mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yang bersumber dari kitab suci bagi masing-masing penganut agama. Akan tetapi pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat, hal ini berbeda dengan norma-norma lainnya (Rosman, 2015).

Konsep yang digunakan oleh sosiologi agama, terletak pada kemampuannya menjelaskan hal-hal yang sifatnya terbatas atau tidak umum ke dalam konsep yang lebih sederhana dan mudah diambil faedahnya. Dalam kehidupan bermasyarakat kita pernah menemukan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang mulai tidak patuhi aturan atau tata tertib dan mengabaikan nilai dan norma. Ini merupakan suatu kondisi yang disebut sebagai istilah penyimpangan sosial (Syam, 2018).

Ketidaktaatan terhadap standar keluarga dan masyarakat serta cita-cita sosial, dapat menyebabkan hilangnya hubungan dan kohesi kelompok. Siapapun, baik secara individu maupun kelompok, dapat melakukan penyimpangan sosial. Kejahatan, perkelakian, pergaulan bebas, penggunaan zat ilegal, dan bentuk-bentuk penyimpangan sosial lainnya hanyalah beberapa contoh (Firmansyah, Iman, 2019).

Secara umum, penyimpangan sosial terkait dengan hasil yang buruk. Analoginya mengklaim bahwa gantung diri adalah contoh penyimpangan sosial dalam hal standar agama. Karena ini adalah bagian dari hukum kehidupan yang harus diterima umat manusia sebagai perintah, larangan, dan pelajaran dari Tuhan Yang Maha Esa, menurut konvensi agama. Aturan yang ada di agama terkon-sentrasi pada manusia yang mematuhi semua perintah mereka dan berpantang dari semua larangan mereka. Bagi setiap pemeluk agama, yang bersumber dari kitab suci. Berbeda dengan aturan lain, pelanggaran norma

agama akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” di akhirat (Firmansyah, Iman, 2019).

B. Agama Menurut Pandangan Tokoh

Dalam perspektif Dadang Kahmat, sosiologi agama adalah fenomena sosial yang tersebar luas yang mempengaruhi setiap peradaban di bumi ini. Sosiologi agama adalah elemen dari struktur sosial masyarakat dan salah satu segi dari keberadaan sosial. Selain faktor-faktor lain, agama dapat dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat (Dadang Kahmad, 2009). Sosiologi agama sebagai landasan kehidupan bermasyarakat memungkinkan berkembangnya sikap toleransi, di mana setiap individu menghargai dan menghormati pemikiran dan tindakan kelompok agama atau kepercayaan lain; perbedaan sikap ini disebut sebagai toleransi. Akar kehidupan masyarakat terbentuk dalam lingkaran toleransi berupa plu-ralisme, demokrasi, dan keadilan sosial bagi masyarakat. Selain itu, orang-orang dengan sikap toleransi yang mengakar akan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka, menghormati satu sama lain, dan mengakui kehadiran mereka, memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan. (Hamali, 2017).

Geertz mengemukakan bahwa ada dua hal yang dapat meredam terjadinya konflik keagamaan yaitu toleransi yang didasarkan atas “relativisme kontekstual” dan pertumbuhan

mekanisme sosial bagi bentuk integrasi sosial nonsinkretik yang majemuk, karena keduanya di ibaratkan bagaikan dua sisi mata uang yang sama (Saputra, 2019). Lain halnya pandangan dari Chairi bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh elemen kehidupan manusia untuk menjamin kemakmuran, ketentraman di bumi dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan adalah memiliki kesehatan yang baik, individu dapat melakukan berbagai aktivitasnya salah satu adalah berinteraksi (Chairi, 2017). Agama adalah panduan fisik dan spiritual yang menelusuri kepribadian seorang individu (Firmansyah, Iman, 2019).

Menurut pemikiran dari Muhammad Basyir Syam agama sebuah kepercayaan dengan sungguh-sungguh dan mendidik umatnya bagaimana berperilaku sosial agar dapat hidup berdampingan secara toleran, dan damai dengan seluruh umat manusia yang juga sadar akan persatuan umat manusia (Syam, 2018). Adapun menurut M. Rasyid agama berbicara tentang peran agama dalam trans-formasi masyarakat, penelitian tentang pengaruh struktur masyarakat dan perubahan pemahaman ajaran agama atau konsepsi keagamaan, studi tentang derajat pengamalan agama masyarakat (M. Rasyid Ridla, 2012).

C. Hubungan Agama Dan Kehidupan Sosial

Konflik didefinisikan sebagai proses sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana satu pihak berusaha untuk menenyapkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Sumber konflik antara dua atau lebih pihak yang saling bergantung dikenal sebagai objek konflik. Perbedaan yang dibawa setiap individu ke dalam wacana dapat menimbulkan konflik. Karakteristik fisik, pengetahuan, kebiasaan, dan berbagai variabel lain mungkin semua berperan dalam variasi ini. (Syam, 2018).

Legitimasi sosial ini dapat berdampak pada masyarakat yang bersangkutan, karena fenomena sosial ini akan memaksa individu untuk menempatkan diri dalam perubahan sosial yang terjadi, dan kemudian mereka akan berjuang untuk kemajuan dalam berbagai profesi sepanjang hidup mereka. Dalam masyarakat, ini dapat menimbulkan pertempuran baik dan buruk.

Agama juga dapat menjadi kebutuhan mendasar dimana agama dijadikan sebagai kegiatan seremonial yang harus diselesaikan agar seseorang merasa tentram dan nyaman dalam memeluk suatu agama tertentu. Agama juga membentuk kerangka kerja yang berfungsi yang menuntut seseorang atau kelompok untuk mengikuti hukum masyarakat. Munculnya kelompok agama menyebabkan peningkatan kepercayaan individu kepada Tuhan. Nilai dan standar sosial sangat esensial dan memegang peranan vital dalam kehidupan bermasyarakat (M. Rasyid Ridla, 2012).

Perkembangan sosial dalam masyarakat terkait erat dengan keyakinan agama terjadi dari hasil kebudayaan, yaitu agama bumi, yang ada, hidup, dan tumbuh dalam masyarakat dan berperan penting dalam transformasi sosial ini. (Imran, 2015). Agama mungkin menjadi faktor kuat dalam keberadaan manusia. Agama dapat berdampak pada manusia dalam berbagai cara. Ide-ide dan cita-cita agama dapat mempengaruhi bagaimana orang berperilaku dan bagaimana masyarakat mengelola kehidupan mereka bersama. Orang-orang beragama percaya itu didasarkan pada iman, sementara sosiologi percaya itu didasarkan pada data faktual. Dalam kelompok agama, kepercayaan penting bagi keberadaan mereka, dan mereka mengidentifikasinya dengan sesuatu yang transendental dalam kehidupan ini (Nurrohman, 2011).

Agama memberikan hubungan rasa emosional, rasa aman baru, dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian dan ketidakmungkinan hidup manusia, meskipun nilai dan tingkat kepercayaannya berbeda-beda. tergantung pada jenis masyarakat dan nilai-nilai. Prinsip-prinsip suci agama, di sisi lain, memiliki pegangan yang kuat pada mereka yang mengikutinya. Pengaruh agama terhadap masyarakat, terlihat dari munculnya, perkembangan, dan pembentukan kelompok agama baru.

D. Perspektif Agama Terhadap Penyimpangan Sosial

Berbicara mengenai perilaku menyimpang bukanlah suatu fenomena yang baru lagi. Sadar atau tidak sadar seseorang pasti pernah mengalaminya atau melakukannya, bahkan perilaku tersebut sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil menentang aturan ayahnya, homoseksualitas kaum Nabi Luth yang dilakna Tuhan, hingga tindakan anak-anak pada masa sekarang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang serta berbagai Tindakan kriminal dan kejahatan antar negara lainnya (Buana, 2017).

Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam sekala luas atau sempit bahkan ketika dalam kehidupan masyarakat sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dibawah ini merupakan definisi perilaku menyimpang menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:(Syaid, 2019).

1. Robert M. Z. Lawang

Perilaku menyimpang merupakan segala tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam system sosial dan dapat menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam system itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

2. Lemert (1951)

Penyimpangan dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.

1) Penyimpangan Primer (*Primary Deviation*)

Penyimpangan primer ialah penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi sipelaku masih dapat diterima didalam masyarakat. Penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berturut-turut, dan masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya seperti, melanggar rambu-rambu lalu lintas, terlambat membayar iuran listrik atau air, dan lain-lainnya.

2) Penyimpangan Sekunder (*Secondary Deviation*)

Penyimpangan sekunder ialah penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang secara umum yang disebut sebagai perilaku me-nyimpang. Pelaku dikontrol oleh Tindakan me-nyimpang tersebut, karena merupakan Tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya seperti, penggunaan obat-obatan ter-larang, mengedarkan obata-obatan terlarang, pem-bunuhan, perampokkan dan lain-lainnya (Syaid, 2019).

a) Ciri-Ciri Perilaku Menyimpang

Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang ialaha sebagai berikut: (Elly M, 2011).

1. *Penyimpangan diartikan*, perbuatan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan normas-norma yang telah ditetapkan oleh negara maupun adat yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagai penyimpangan karena merugikan banyak orang atau mengganggu masyarakat sehingga membuat keresahan, misalnya seperti seorang pejabat negara yang melakukan Tindakan korupsi adalah penyimpangan sebab tindakannya merugikan negara dan sebagainya.
2. *Penyimpangan bisa diterima juga bisa ditolak*, artinya tidak semua perilaku menyimpang dianggap negatif, tetapi adakalanya perilaku menyimpang itu justru mendapat pujian. Misalnya seperti dalam sebuah peperangan, seorang prajurit yang berkhianat memihak pada musuh dianggap sebagai pembelot (memyimpang), tetapi dikalangan musuh ia dianggap pahlawan, sebab telah berjasa membeberkan kelemahan musuhnya.
3. *Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak*, Tidak ada pribadi manusia yang berperilaku sempurna, sesuai dengan cita-cita dan konvensi masyarakat, atau yang sepenuhnya menyimpang darinya dalam kehidupan mereka. Frekuensi penyimpangan yang dilakukan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan perilaku menyimpang sebagai penyimpangan absolut atau relatif. Jika perbuatan aktor menyimpang itu diperbolehkan oleh masyarakat, maka

dikategorikan sebagai penyimpangan relatif; Namun, jika perilaku menyimpang lebih sering, itu diklasifikasikan sebagai penyimpangan absolut.

4. Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, yang berarti bahwa suatu kegiatan yang sebenarnya dianggap selaras dengan budaya yang berlaku dalam tatanan masyarakat, namun dinilai menyimpang oleh hukum positif. Misalnya, masyarakat Jawa memiliki sejarah melempar bunga atau hadiah di persimpangan jalan umum pada waktu-waktu tertentu, padahal kegiatan ini dianggap menyimpang dari standar sanitasi kota karena bunga dan sumbangan yang dibuang masyarakat dianggap sampah.
5. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, motif perilaku yang dilakukan orang untuk mencapai keinginannya tanpa harus melanggar nilai dan norma tetapi sebenarnya perilaku tersebut melanggar nilai dan norma. Di dalam norma agama Islam terdapat prinsip bahwa bunga dari transaksi utang piutang adalah riba. Agar perbuatan membungakan uang dalam proses utang piutang tidak dianggap haram, maka mereka melahirkan norma penghindaran, agar pelaku tidak terjerat dalam penyimpangan norma. Norma penghindarannya sering kali disebut dengan istilah bagi hasil, bukan bunga pinjaman.

6. *Penyimpangan sosial bersifat adaptif (penye-suaian)*, artinya aksi ini dapat mendatangkan ancaman disintegritas sosial tetapi justru diperlukan untuk menjaga integritas sosial. Misalnya aksi sosial politik pro demokrasi yang menolak keberadaan pemerintahan yang otoriter semula dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang, akan tetapi aksi tersebut justru didonasikan oleh banyak orang, sehingga eksistensi aksi sosial politik anti-pemerintah justru dianggap selaras. Misalnya seperti aksi *people power* di Filipina yang meruntuhkan pemerintahan rezim Ferdinand Marcos pimpinan Corazon Aquino.

E. Tantangan dan Peluang Agama dalam Menghadapi Penyimpangan Sosial

Agama dapat dikatakan sebagai suatu fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, dari yang primitive hingga yang ultra-modern, dengan situasi demikian manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang beragama (M. Sulaiman, 2019).

Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai aspek buruk dari perilaku baik yang tidak sesuai dengan standar masyarakat, seperti norma hukum, moral, dan kesucilaan, serta norma agama. Menurut Bruce J. Cohen, standar yang menjadi dasar penyimpangan didasarkan pada standar nilai dan norma sosial masyarakat, bukan pada baik atau jahat, benar atau salah dalam arti luas. Dalam kebanyakan kasus,

penyimpangan sosial disertai dengan konsekuensi negatif. (Dwi Narwoko, 2007)

Dalam norma agama, dapat kita misalkan seperti gantung diri. Gantung diri dapat dikatakan sebagai suatu penyimpangan sosial. Karena dalam pandangan norma agama ini merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah dan larangan serta ajaran yang bersumber dari Tuhan. Norma agama di disampaikan kepada umat agar mematuhi segala perintahnya dan menjahui segala larangannya. Yang bersumber dari kitab suci bagi masing-masing penganut agama. Tetapi pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan balasan dari Tuhan berupa “siksa” kelak diakhirat berbeda dengan norma lainnya (Rosman, 2015).

Dapat kita ketahui bahwa jenis-jenis penyimpangan sosial bukan hanya gantung diri, banyak penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya yang terjadi dalam masyarakat saat ini seperti penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa, perilaku hubungan seks diluar nikah, homoseksual, alko-holisme serta masih banyak lainnya penyimpangan yang terjadi saat ini.

Faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan sosial antara lain adalah sikap mental yang tidak sehat, ketidakharmonisan keluarga, pelampiasan rasa kecewa, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media masa dan mungkin masih banyak lagi faktor yang dapat kita lihat yang menjadi sebab terjadinya penyimpangan.

F. Penutup

Dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dapat dikatakan sebagai dari bagian yang negative dari bentuk perilaku positif, perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang terdapat didalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma kesusilaan, kesopanan, dan juga norma agama.

Agama menjadi peranan penting dalam kehidupan manusia, dimana agama dapat mempengaruhi manusia dari berbagai aspek kehidupan. Agama juga dapat menjadi sebuah solusi bagi setiap hal yang menyimpang dari norma-norma agama. Agama bertaut kepercayaan dengan berbagai problematika yang terjadi saat inisenantiasa didapatkan dalam setiap masyarakat, termasuk memberikan arti, makna dan interpretasi-interpretasi oleh para ahli ilmu pengetahuan tentang susunan sosial dalam masyarakat agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim. (2002). *Fiqh Siyasaah Konsepasi Kekuasaan Politik dalam al- Qur'an*. 2002.
- Amin, S. (2017). Identitas Politik Islam Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin. 2017.
- Bahar, H. M., & Teng, A. (2017). Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). 5(1), 2354–7294.
- Barnwell, A. (2018). Durkheim as affect theorist. *Journal of Classical Sociology*, 18(1), 21–35.
<https://doi.org/10.1177/1468795X17702917>
- Bernard Raho. (2007). *Bernard Raho.pdf*.
- Buana, R. D. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Chairi, A. N. (2017). PERSPEKTIF AGAMA ISLAM TERHADAP KELUARGA SEHAT DI KOTA MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI JAMBI TAHUN 2017. 6(01).
- Dadang Kahmad. (2009). *Sosiologi Agama*. 2009.
- Dany Haryanto, S. . dan G. E. N. (2011). Dany Haryanto, S.S dan G. Edwi Nugroho, (2011). Pengantar Sosiologi Dasar, (Jakarta: PT. Prestas Pustakarya. 2011.

- Daroeso, B. (1986). Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila, Semarang: Aneka Ilmu, 1986. 1986.
- Dr. Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa.
- Dwi Narwoko. (2007). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. 2007.
- Elly M. Setiadi. (2011). Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi., Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Elly M. (2011). Pengantar Sosiologi.
- Elvandi, M. (2010). Muhammad Elvandi, Lc.
- Erfan Gazali. (2018). Pesantren Di antara. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9.
- Eva Rosyida. (2019). Eva Rosyida, 2019. e-Modul Sosiologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2019.
- Fauzi. (2017). *Fauzi.pdf*.
- Firmansyah, Iman, M. (2019). Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 79–90.
- Giddens, A. (1991). *Anthony_Giddens.pdf*.
- Gunawan Adnan. (2020). Gunawan Adnan, Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020). 2020.
- Haboddin, M. (2012). Muhtar haboddin, (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal . *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.3 No. 1. 3(1), 2012.
- Hamali, S. (2017). Agama Dalam Perspektif Sosiologis. 12, 2017.
- Hamzah Ya'kub. (1993). *Hamzah.pdf*.

- Hemafitria. (2015). Hemafitria. (2015). Pembelajaran pkn sebagai pendidikan politik pemilih pemula . *Edukasi*, 13(2). 13, 2015.
- Imran, A. (2015). PERANAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT. *Hikmah*, 2(1), 23–39.
- Jasiman, R. D. (2012). Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat. 2012.
- Joko Santosa. (2019). Pendidikan Agama Islam. *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan*, 2(25), 64–88.
- Kuntowijoyo. (1991). *Kuntowi.pdf*.
- M. Rasyid Ridla. (2012). SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *AL-Ihkam*, 7(2), 294–304.
- Maloko, M. T. (2013). Etika Politik dalam Islam, dalam *Jurnal Al-Daulah*. 1(2), 2013.
- Mubasyaroh. (2018). Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam. 1(2), 2018.
- Muchith, M. S. (2012). Islam Dan Filosofe Auguste Comte.
- Munir Fuady. (2013). *munir fuady.pdf*.
- Mushfi, M. (2020). *Modernisasi Pendidikan*. 2507 (February), 1–9.
- Nadir. (2019). *Membangun Pendidikan*. 3(1), 1–9.
- Nanang Martono. (2016a). *Nanang.pdf*.
- Nanang Martono. (2016b). *Sosiologi Perubahan Sosial*.
- Nurdin, M. F. (2017). Sosiologi Kontemporer: Filsafat Dan Orientasi. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15267>
- Nurrohman. (2011). Politik Islam dalam Cita dan Realita.
- Priyanto, E. (2021). Peningkatan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Tematik Melalui Supervisi Akademik. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v8i1.1077>

- Puspitasari, R. (2018). Revousi Perancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme Dan Demokrasi Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji Dan Dampaknya Di Dalam Dan Luar Negeri. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2–22.
- Qardhawi, Y. al. (2008). Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah. 2008.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *TAPIS*, 7(12), 1–30.
- Rosman, E. (2015). Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.
- Roswanto, A. (2015). Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles. In *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* (Vol. 15, Issue 2, pp. 123–138).
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Safa'at, M. (2002). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls). November, 1–13.
- Sandra, L. J. (2013). Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur Dki Jakarta 2012 Di Media Sosial Twitter. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2).
- Saputra, H. E. R. (2019). PLURALISME AGAMA: STUDI TENTANG MAKNA DAN POLA KOMUNIKASI ANTAR UMAT ISLAM, HINDU DAN BUDHA DI PULAU LOMBOK. KOTA MATARAM. XI(1).

- Setyaningrum, A. (2005). Setyaningrum, Arie, (2005), Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas , (Mandatory, Journal Institute for Research and Empowerment (IRE), vol. 2, no. 2. 2(2), 2005.
- Soerjono Soekanto. (1999). *Soerjono Soekanto.pdf*
- Soerjono Soekanto. (2003). *soerjono.pdf*
- Sukardi, I. (2003). *Imam sukardi.pdf*
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Sulaiman, M. (2019). *Makna Agama*.
- Suwanto dan Rahmat Hidayat. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. 3(2), 2020.
- Syaid, M. N. (2019). Penyimpangan sosial dan pencegahannya.
- Syam, M. B. (2018). Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Aqidah-Ta UIN Alaudin Ujung Pandang*, IV(2), 198–213.
- Syarifuddin Jurdi. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*. 2010.
- Taufik, M. (2018). Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(1), 27–45. <http://202.0.92.5/ushuluddin/ref/article/view/1855>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Utomo Harmantyo. (2021). Dekolonisasi Ilmu Sosial di Global Selatan; Kritik Southern Theory dan Epistemologies of the South terhadap Kanon Sosiologi Modern di Indonesia. 2021.

- Wahono, S. (2000). Satrio Wahono, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi, (Bandung: Mizan & Serambi Ilmu Semesta, 2000). 2000.
- Wibisono, Y. (2020). *M. Yusuf.pdf*.
- Wiranata, R. S. (2016). *Tantangan Prospek dan peran pesantren*. 8(July), 1–23.
- Yusak, Y. (2003). Yulius Yusak, (2003). Kemajemukan dan konflik Sosial. *Jurnal PsikoWacana* Vo. II No. 2, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 2, 2003.
- Zakiah Darajat. (1982). *zakiah.pdf*.
- Zawawi, A. (2015). *Politik dalam Pandangan Islam*. 5(1), 2015.

PERUBAHAN PERILAKU KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT DI ERA 4.0



GUNAWAN ADNAN

A. Pendahuluan

Studi tentang masyarakat dalam suatu sistem sosial dikenal sebagai sosiologi. Masyarakat berubah sepanjang waktu dalam struktur sosial ini. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah, baik dalam skala kecil maupun besar. Baik elemen perubahan yang terbatas maupun yang luas dimungkinkan. Aspek sempit meliputi perilaku dan pemikiran, sedangkan aspek luas meliputi perubahan struktur masyarakat yang mungkin berdampak pada evolusi masyarakat di masa depan.

Transformasi sosial adalah fenomena multifaset. Sulit untuk mengaitkan perkembangan sosial dengan satu faktor,

seperti agama. Agama memiliki dua wajah: di satu sisi, ia dapat menjadi katalis bagi pembangunan sosial; di sisi lain, itu bisa menjadi penghalang perubahan sosial. Agama memiliki kekuatan untuk memberikan dampak sosial. Hal ini juga memungkinkan untuk menggunakan pengaruh sosial untuk mempengaruhi perubahan sosial. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang terlihat menyimpang dijadikan sebagai bentuk dari kontrol sosial.

Argumen tentang transformasi sosial tidak akan pernah berakhir. Ada sebagian individu yang berharap akan kemajuan masyarakat, namun ada juga sebagian yang pesimis. Ketika datang ke penelitian ilmu sosial, ada tiga dimensi temporal yang terpisah: masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dengan kata lain, menyelesaikan masalah sosial yang diangkat oleh topik perubahan sosial adalah upaya yang sulit. Hampir semua masalah sosial, di sisi lain, adalah produk dari perubahan sosial. Bahkan masalah lingkungan sering dikaitkan dengan pertanyaan tentang transformasi masyarakat. Studi tentang perubahan sosial, yang merupakan pusat sosiologi, berasal dari abad ke-14. Ibn Khaldun, seorang ilmuwan sosial Islam, dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan konsep perubahan sosial. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden (yang tertinggal) menuju masyarakat yang menetap (disebut masyarakat kota) (Tualeka, 2017).

Studi sosiologis telah lama berfokus pada transformasi sosial, terbukti dari pendapat pelbagai tokoh sosiologis. Perubahan tidak selalu mengacu pada proses, mekanisme, atau arah perubahan; perubahan juga bisa merujuk pada diskusi tentang dampak atau akibat dari perubahan sosial, serta solusi yang diusulkan oleh sosiolog.

Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan, yaitu berupa perubahan yang tidak menarik dalam artian kurang mencolok. Perubahan dapat ditemukan oleh seseorang yang pernah meneliti susunan dan kehidupan masyarakat pada suatu waktu, dan kemudian membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat pada masa lampau.

Perubahan sosial dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang terjadi dan melekat di dalam sistem sosial. Atau dapat diartikan memiliki perbedaan status sistem dari waktu ke waktu. Gagasan mendasar tentang perubahan sosial mencakup tiga elemen: *pertama*, studi tentang perbedaan; *kedua*, penelitian dilakukan pada waktu yang berbeda; dan *ketiga*, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk melakukan suatu kajian tentang perubahan sosial, kita harus dapat melihat suatu perbedaan atau perubahan kondisi dari objek yang menjadi subjek kajiannya, maka perubahan tersebut harus dilihat secara berbeda. Dalam konteks waktu, memerlukan studi banding

pada dimensi waktu yang berbeda, dan objek yang menjadi subjek studi banding harus objek yang sama (Nuridin, 2017).

Agama dapat berpengaruh sebagai dorongan bagi individu untuk melakukan suatu aktivitas karena suatu tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan agama dianggap memiliki unsur kesucian dan ketaatan. Hal tersebut akan meyakinkan seseorang untuk mengambil tindakan. Sedangkan agama sebagai nilai etik dan pedoman bagi manusia dalam melakukan suatu tindakan akan berkaitan dengan ketentuan antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Berbekal pengetahuan agama yang memadai, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan sosial yang merepresentasikan nilai-nilai positif. Karena setiap perubahan sosial pasti akan memiliki konsekuensi yang luas. Adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat merupakan salah satu konsekuensi dari perubahan sosial. Dalam hal ini diperlukan benteng nilai dan norma yang dapat mengarahkan masyarakat agar secara cepat dapat mengikuti arus perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan pelbagai fenomena dan fakta sosial yang ada, Islam berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Munculnya berbagai macam kemajuan dalam kehidupan sosial di masyarakat dapat berpengaruh pada perilaku dan pola bersikap masyarakat.

B. Perilaku Keagamaan

Dalam sosiologi, agama memiliki konotasi yang lebih luas dan inklusif yang tidak terbatas pada agama dalam pengertian tradisional. Agama memenuhi dua tujuan yang berlawanan. Sebagai permulaan, agama membantu menyatukan orang dan memperkuat ikatan sosial. Lebih jauh lagi, agama berpotensi memisahkan individu dengan menimbulkan per-selisihan sosial, yang dapat berupa konflik antar kelompok agama hingga konflik komunal, bahkan di dalam kelompok yang sama (Nanang Martono, 2016).

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang agama, salah satunya yaitu, menurut Harun Nasution, menyatakan agama memberikan ikatan yang harus dipatuhi dan dipegang manusia. Hubungan tersebut merupakan perwujudan dari suatu kekuatan yang lebih besar dari manusia, artinya suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera (Dadang Kahmad, 2009).

Tokoh lain, Taib Thahir Abdul Mu'in, berbagi pandangannya tentang agama, yang menyatakan bahwa agama adalah aturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki alasan untuk mematuhi peraturan tersebut dengan kehendak dan pilihannya sendiri untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat (Dadang Kahmad, 2009). Jadi agama adalah ajaran ilahi yang berisi hukum-hukum yang mewajibkan pemeluknya untuk

mengikuti semua aturan yang ditetapkan agar bahagia di dunia dan di akhirat.

Emile Durkheim, salah satu sosiolog paling terkenal, berpendapat bahwa "suatu sistem gagasan dan praktik yang telah disatukan dan diikat dengan hal-hal suci, maka keyakinan dan praktik yang bersatu ini membentuk komunitas moral tunggal." "Sifat suci" agama dan "praktik ritual" agama itu adalah dua elemen penting yang harus diketahui sebagai syarat sesuatu untuk disebut agama, menurut pernyataan ini.

Setiap agama mendorong umat manusia untuk menjaga keharmonisan yang konstan antara makhluk hidup dan lingkungan untuk hidup dalam damai. Agama memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam keberadaan manusia dan masyarakat karena agama menghadirkan sistem nilai berdasarkan standar sosial yang dapat diikuti orang di mana pun mereka berada. Cita-cita religius dapat dirasakan secara emosional, memberikan rasa dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi tanggung jawabnya dan meninggalkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan (Kuntowijoyo, 1991).

Masyarakat selalu berkaitan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial masyarakat yang ditopang dengan mematuhi dan menjalankan aturan-aturan tertentu, seperti norma agama dan interaksi sosial, yaitu interaksi sosial antar individu. Salah satu peran individu dalam masyarakat, menurut sosiologi,

adalah menyesuaikan diri dengan standar dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Ajaran agama menganjurkan perubahan sosial yang dilandasi dan mengutamakan nilai-nilai, seperti pergeseran dari buruk ke baik atau sebaliknya. Setiap perubahan dalam pelbagai unsur harus dilakukan sesuai dengan keyakinan agama yang dianut (Syarifuddin Jurdi, 2010). Agama sangat berpengaruh serta sebagai motivasi untuk mendorong individu dalam melakukan suatu aktivitas, karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan.

Pemahaman tentang fungsi agama tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Agama dipandang mampu memberikan solusi yang dibutuhkan. Masyarakat memiliki tuntunan tertentu untuk bertahan hidup, dan agama berfungsi untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan tersebut.

Perilaku keagamaan adalah salah satu bentuk ungkapan pengalaman keagamaan. Sebagaimana yang telah diamati oleh banyak peneliti yang telah melakukan pengamatan tentang perilaku ibadat, ritus dan do'a yang dilakukan oleh sosiolog. Fungsi sosial agama, menurut Durkheim, adalah memelihara dan melestarikan masyarakat yang ada. Agama berfungsi sebagai katalisator bagi kohesi dan kebersamaan sosial (Soerjono Soekanto, 2003).

Adapun bentuk-bentuk perilaku keagamaan diantaranya yaitu aktif dalam organisasi keagamaan. Seseorang dengan perilaku sosial yang baik terlibat dalam kelompok keagamaan di komunitasnya, karena organisasi sangat penting bagi perkembangan sosial seseorang; dengan suatu organisasi, seseorang dapat mempraktekkan cara berhubungan dengan orang lain dengan baik, bersosialisasi, dan berlatih saling menghargai. Lalu ada seseorang dengan akhlak mulia yang senang membantu orang lain, memberi, dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan suatu bentuk perilaku keagamaan yang ditunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki rasa sosial keagamaan yang tinggi (Zakiah Darajat, 1982).

C. Perubahan Yang Mungkin dan Dapat Terjadi

Secara sederhana, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan diartikan sebagai sesuatu yang bergerak, baik itu bergerak mengarah pada kemajuan ataupun sebaliknya. Perubahan sosial dalam sosiologi mempunyai arti sebagai mekanisme dalam struktur sosial yang terlihat dalam perubahan budaya, perilaku, aturan, sistem nilai serta organisasi sosial (Eva Rosyida, 2019).

Pengaruh pada bagian-bagian struktur sosial yang tidak berdampak langsung atau signifikan terhadap masyarakat

dapat disebut sebagai perubahan, baik kecil maupun besar. Perubahan gaya berpakaian, misalnya, akan berdampak kecil pada masyarakat secara keseluruhan karena tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan organisasi sosial; di sisi lain, proses industrialisasi dalam masyarakat agraris dapat dipandang sebagai bentuk perubahan sosial yang masif. Ikatan pekerjaan, sistem kepemilikan tanah, interaksi keluarga, dan stratifikasi masyarakat hanyalah beberapa kelompok sosial yang akan bergeser.

Kemudian kita bisa melihat bagaimana populasi telah berubah. Di Pulau Jawa, khususnya di wilayah metropolitan, telah memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama penyempitan luas lahan, karena jumlah kelahiran yang terus meningkat, sehingga memerlukan penciptaan ruang hidup tambahan. Dampak dari hal tersebut dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan kriminalitas. Mereka akan bekerja sebagai buruh tani jika tinggal di pedesaan dan tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Perempuan dan anak yang bekerja untuk menghidupi keluarga dan mencari nafkah dirampas haknya untuk hidup sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pada akhirnya, sebagai akibat dari ketidak-seimbangan antara jumlah luas tanah dan kepadatan penduduk yang mendiaminya, proses individualitas menjadi lebih kuat, dan kepemilikan tanah, seperti hak teritorial, semakin berkurang. Akibatnya, organisasi sosial baru muncul, hubungan kerja,

gadai tanah, dan bagi hasilnya, dimana pada dasarnya semua itu hanya untuk mencari keuntungan. Pola tersebut menyebabkan masyarakat hanya dapat bertahan di atas standar minimal untuk hidup. Keadaan demikian dapat dikatakan sebagai lahan bersama (*Shared Property*) (Elly M. Setiadi, 2011).

D. Pengaruh 4.0 Terhadap Perubahan Perilaku Keagamaan

Pada era globalisasi, kemajuan industri sangat menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi pada saat ini. Maka, pendidikan diharapkan dapat berperan serta memposisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi yang banyak dalam mengupayakan eksistensi dunia pendidikan. Lembaga pendidikan diharapkan tangguh dalam menghadapi segala tantangan serta perubahan-perubahan yang timbul dalam lingkungan masyarakat.

Era evolusi industri 4.0 mempunyai pengaruh yang tidak sederhana, melainkan berpengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pendidikan. Maka dari itu banyak menimbulkan kegundahan bersama jika penerus generasi bangsa menganggap pendidikan karakter atau akhlakul karimah bukan lagi suatu hal yang utama. Era evolusi 4.0 selalu memberikan perubahan dengan cepat dan terkadang sulit untuk diikuti oleh masyarakat awam. Berkaitan

itu, untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari kemajuan dan laju modernisasi yang sangat cepat ini, maka individu harus sadar dan melindungi diri dengan segala kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada diri setiap individu.

Pendidikan agama pada dasarnya merupakan suatu proses yang sifatnya menyeluruh dan terstruktur yang dapat melatih dan membentuk pribadi baik itu individu ataupun masyarakat yang berdasarkan pada ajaran Islam. Pendidikan agama di era revolusi 4.0 ini ada baiknya lebih menanamkan dasar tauhid dan akhlakul kharimah, di samping itu juga memelihara, menjaga, serta mengamalkan ajaran yang diperoleh dari para tokoh agama, para ahli, serta peneliti. Dengan begitu, hal-hal baru yang didapatkan pada era revolusi 4.0 ini termasuk sejalan dengan ajaran pendidikan agama serta dapat di terima oleh masyarakat (Hamzah Ya'kub, 1993).

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai moralitas dalam sistem kehidupan manusia. Sehingga fondasi utama yang menjadi kebanggaan umat islam yaitu dibangunnya pendidikan yang memberikan pengetahuan dalam bentuk sikap, kepribadian, serta keterampilan berperilaku yang menjadi modal dasar seorang muslim menjalani kehidupannya.

Perilaku pada dasarnya adalah mempertimbangkan akal pikiran dan moral yang menjadi rutinitas dalam berperilaku juga norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat.

Perilaku yang dimaksud merupakan suatu sikap yang terpuji sebagaimana perilaku Rasulullah SAW. semasa hidupnya.

Pendidikan bukan sekadar mendatangkan pribadi yang *smart*, akan tetapi juga harus memiliki karakter dan kepribadian yang unggul dengan cita-cita agar menciptakan generasi penerus bangsa yang maju dan berkembang sesuai dengan karakter yang telah tertanam dalam nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa meningkatnya pendidikan karakter menjadi dasar pengendali bagi generasi yang hidup pada era modern dalam menghadapi revolusi yang terjadi pada saat ini (Mushfi, 2020).

Sebagai generasi milenial yang hidup di era revolusi 4.0, maka perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter sebagai pembentu prilaku dan kepribadian, baik itu berperilaku dalam media sosial maupun di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terbentuknya generasi milenial yang memiliki budi pekerti yang baik serta daya saing yang kuat yang bersumber dari norma bangsa dan agama.

E. Tantangan Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Teknologi 4.0

Berbicara mengenai perubahan sosial memang tidak lengkap jika tidak membahas mengenai teknologi. Teknologi merupakan suatu faktor penting dalam mempengaruhi proses

perubahan sosial. Bahkan seorang individu belum layak dikatakan sebagai manusia modern jika belum bersentuhan dengan teknologi.

Orang-orang awal di zaman prasejarah tidak memiliki gagasan tentang teknologi; mereka hanya mengetahuinya sebagai alat yang membantu mereka mendapatkan makanan, berburu, dan menyiapkan makanan. Bambu, kayu, batu, dan bahan dasar lainnya yang dapat diperoleh di alam digunakan sebagai alat.

Teknologi adalah pendekatan ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu terapan atau sarana, seperti menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk keberadaan dan kenyamanan manusia. Teknologi juga dapat didefinisikan sebagai teknik untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan alat dan akal agar sesuai dengan kebutuhan manusia, seolah-olah teknologi dapat memperluas, memperkuat, atau membuat anggota badan, indera, dan otak manusia lebih kuat (Nanang Martono, 2016).

Dunia saat ini telah berada pada era 4.0, yang dimulai pada abad ke-18 sejarah perjalanan revolusi industri telah mengalami puncak revolusi pada saat ini. Dengan terciptanya berbagai teknologi digital yang mempunyai dampak besar terhadap kelangsungan hidup di seluruh dunia, serta terjadinya peningkatan besar dalam sektor industri, teknologi informasi, dan komunikasi yang sangat dimanfaatkan dengan baik. Dalam menghadapi danya era 4.0 ini perlu adanya

pembenahan, terutama pada perspektif dalam keterampilan teknologi yang menjadi batas penilaian untuk daya saing di masa sekarang ini (Wiranata, 2016).

Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terjadi besar-besaran memberikan pengaruh yang besar pula terhadap kelangsungan hidup manusia. Banyak keringanan yang ditawarkan dengan adanya era revolusi 4.0 ini, perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mendatangkan wajah-wajah baru dalam interaksi sosial masyarakat. Semakin canggihnya teknologi digital ini, maka terjadi kemampuan yang sangat ketat dalam lingkungan masyarakat baik individu maupun kelompok.

Fenomena ini bukanlah suatu hal yang baru terjadi, melainkan sudah keempat kalinya sehingga penyesuaian adalah hal yang paling wajib dilakukan agar tidak tertindas oleh teknologi yang terus-menerus berkembang. Kedatangan era revolusi 4.0 ini juga memberikan usaha menjadikan kehidupan ini lebih sederhana, serta mempermudah akses pengetahuan, dan mempersingkat cara bekerja yang efektif.

Teknologi informasi menjadi dasar dalam kehidupan manusia, semuanya terpengaruh oleh kemajuan internet dan teknologi digital yang penggunaannya tanpa batas dalam segala konsekuensinya. Hal ini juga bisa mengubah pemikiran seseorang dalam menjalani kehidupan di era modern yang serba canggih ini. Di tambah lagi adanya persaingan antar bangsa yang dituntut dalam penguasaan *skill*, pengetahuan

dan teknologi, serta menuntut manusia untuk mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat ini. Maka dari pemahaman era 4.0 ini, diwajibkan untuk mengikuti serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang terjadi (Mushfi, 2020).

Kehidupan manusia berpijak pada teknologi informasi. Karena internet dan teknologi digital menjadi tulang punggung mobilitas manusia, semuanya dilakukan tanpa batasan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mengantarkan era baru dalam peradaban manusia, era dengan jangkauan luas yang membatasi hubungan manusia dalam ruang dan waktu. Teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan pelbagai tugas hidup, sehingga menghasilkan sikap, perilaku, dan cara hidup yang lebih produktif, serta modifikasi gaya hidup yang semakin modern (Erfan Gazali, 2018).

Peranan teknologi dalam mempengaruhi perubahan manusia bukanlah hal yang perlu dipertanyakan lagi, saat ini manusia tidak akan bisa hidup tanpa teknologi. Teknologi dapat menyatukan masyarakat, dan juga dapat memecah belah masyarakat. Ada empat perubahan cara berpikir yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, yaitu:

1. Munculnya reifikasi, atau keyakinan bahwa apa yang menjadi semakin umum dalam kenyataan harus diproduksi dalam bentuk luar dan dikuantifikasi.

2. Manipulasi, atau kekuatan teknologi untuk mengubah dan mengolah benda-benda alam menjadi sesuatu yang artifisial untuk memuaskan keinginan manusia, sehingga menghasilkan kemampuan manipulasi yang tinggi pada kerangka berpikir manusia.
3. Fragmentasi, atau adanya spesialisasi dalam pembagian kerja, yang pada gilirannya menuntut profesionalisme di tempat kerja.
4. Individualisasi, atau semakin besar keterlibatan individu dalam perilaku kehidupan sehari-hari, semakin rapuh ikatan seseorang dengan masyarakat (Nanang Martono, 2016).

Adapun karakteristik yang terbentuk pada generasi di era revolusi 4.0 ini yaitu kecanduan internet, percaya diri, harga diri tinggi, lebih fleksible dan terbuka, bertoleransi dalam perubahan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Dulu, para tokoh seperti guru, para kyai, ulama, birokrat dan politisi mempunyai pengaruh yang sangat besar sebagai agen sosialisasi, berbeda dengan masa sekarang ini fungsi sosialisasi tradisional telah digantikan dengan media *computer* dan *smartphone*.

Penerus yang hidup di era revolusi 4.0 ini mempunyai karakter yang khas, bisa kita lihat sejak menduduki bangku sekolah dasar sudah menggunakan *gadget* serta menjadikan

internet sebagai keperluan pokok. Pada saat ini setiap orang memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaiannya kepada orang lain dengan menggunakan media sosial online. Hal ini dapat mendatangkan efek yang akan membuat ketergantungan tinggi dalam menggunakan media informasi digital.

Oleh karena itu, pendidikan karakter dapat menjadi salah satu cara untuk mengembalikan kesadaran moral seseorang, namun memerlukan pengawasan yang terus menerus dari semua pihak yang terlibat. Keluarga, lembaga pendidikan, media, masyarakat, dan pemerintah semua harus bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab mereka semaksimal mungkin (Mushfi, 2020).

F. Penutup

Kesimpulan

Agama merupakan salah satu penyalur perubahan sosial. Melalui ajaran yang ditanamkan kepada umatnya, agama berdampak pada pemikiran manusia. Manusia memperoleh kepercayaan dalam berbagai upaya mereka untuk mencapai kesuksesan sebagai hasil dari ini. Agama yang penuh teka-teki tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan akal manusia kontemporer. Nyatanya, kemajuan teknologi belum mampu menjawab semua persoalan kemanusiaan. Akhirnya,

masyarakat akan kembali mengakui keberadaan agama, dan agama akan menjadi institusi yang abadi.

Setiap saat remaja dan masyarakat pasti menggunakan media sosial dalam berkomunikasi, sebagai suatu wujud eksistensi mereka pada komunitasnya dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial memiliki pengaruh dampak positif dan negatif sesuai dengan bagaimana cara menggunakannya, bila media sosial digunakan dengan bijak seperti untuk membangun jaringan komunikasi yang bermanfaat, digunakan untuk belajar, berwirausaha, maka yang didapatkan adalah dampak positif, namun jika media sosial digunakan dengan tidak bijak untuk suatu hal yang menyimpang seperti untuk mengakses konten negatif, melakukan *hack*, melakukan plagiarisme, atau melakukan penipuan maka dampak yang didapatkan yaitu dampak negatif dan tidak baik bagi kehidupan penggunanya.

Teknologi juga bisa mengancam kematian melalui pelbagai penyakit, kerusakan lingkungan, serta memberi pelbagai resiko pada diri manusia. Kita dapat melakukan banyak hal dengan teknologi. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa teknologi selalu berwajah ganda, di satu saat ia bisa menjadi teman, di saat bersamaan bisa menjadi lawan yang mengakibatkan manusia menjadi terpengaruh oleh canggihnya teknologi. Maka dari itu, pendidikan karakter merupakan salah satu teknik untuk mengembalikan kesadaran moral seseorang, dan melibatkan pengawasan terus menerus

dari semua pihak yang terkait. Keluarga, lembaga pendidikan, media, masyarakat, dan pemerintah semua harus bekerja sama untuk memenuhi kewajibannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Kahmad, Dr. 2009. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erfan Gazali, 2018. "Pesantren di antara Generasi Alfa dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Kajian Islam Vol. 2, No. 2*, IAIN Syekh Nurjati.
- Eva Rosyida, 2019. *e-Modul Sosiologi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Hamzah Ya'kub. 1993. *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro.
- Kuntowijoyo, 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Muhammad Mushfi El Iq Bali, Hilya Banati Hajriyah. 2020. "Modernisasi Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Momentum Sosial dan Keagamaan Vol. 09 No. 1*, Probolinggo: Universitas Nurul Jadid.
- Nanang Martono, 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- R.Z. Ricky Satria Wiranata. 2019. "Tantangan Prospek, dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam Vol.8 No. 1*.

- Soerjono Soekanto, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Syarifuddin Jurdi, 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Zakiah Darajat, 1982. *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Moral*, Jakarta: Bulan Bintang.

PENDEKATAN TEORI FUNGSIONAL EMILE DURKHEIM DALAM MEMAHAMI KONSEP BERAGAMA MASYARAKAT MODERN



GUNAWAN ADNAN

A. Pendahuluan

Agama dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara agama dengan masyarakat terlihat di dalam masalah ritual. Keyakinan terhadap tatanan moral yang ada, yang menjadi dasar kesatuan mekanis, ditekankan oleh ritual-ritual yang muncul dalam mengumpulkan orang-orang dalam ritus-ritus keagamaan. Agama sebagai alat untuk integrasi komunal, serta tindakan seremonial, terus menyoroiti ketaatan manusia pada agama, yang membantu mempromosikan solidaritas.

Konsep agama didefinisikan oleh umat beragama sebagai suatu ajaran, sumber, dan cara hidup yang memberikan keselamatan dalam hidup ini dan selanjutnya. Akibatnya, jika dibandingkan dengan isu-isu lain, agama adalah topik paling signifikan yang mendapat perhatian serius. Kemudian kepedulian agama akan berdampak pada pertumbuhan kehidupan manusia, khususnya dalam hal humanistik, hukum, moral, etika, dan masalah estetika. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarahnya yang sarat dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kemajuan keberadaan manusia dan alam. Alasan utama umat manusia untuk terus mengembangkan pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang mapan adalah keinginan untuk keberadaan yang lebih baik. Berbagai ilmu yang telah mapan diproyeksikan untuk mengubah pola eksistensi yang maju (Joko Santosa, 2019).

Beragam disiplin ilmu, seperti yang dipersyaratkan oleh keadaan. Selain itu, humaniora, agama, budaya, dan lain-lain seperti filsuf dan ilmuwan di zaman sekarang disertakan. Pada pertengahan abad kesembilan belas, para peneliti Barat (sosiolog) terpesona oleh agama sebagai aspek integral dari keberadaan manusia. Emile Durkheim, seorang sosiologi Prancis, dan Max Weber, seorang sosiologi Jerman, keduanya terkenal.

Sosiolog mendefinisikan agama sebagai cara hidup yang harus diterapkan baik dalam kehidupan individu maupun

kolektif. Keduanya memiliki interaksi yang saling menguatkan dan saling berhubungan dengan semua variabel yang berkontribusi pada struktur sosial suatu masyarakat. Masyarakat dan agama sama-sama berkontribusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan secara eksperimental oleh orang-orang karena kapasitas dan ketidakpastian mereka yang terbatas. Dengan demikian, agama memiliki tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat makmur, aman, dan sebagainya.

Kajian sosiologi agama tentang modernitas tidak hanya mencakup hubungan antara modernitas dalam masyarakat dan dampaknya terhadap agama, tetapi juga hubungan antara modernitas dalam keyakinan tertentu dan konsekuensinya terhadap masyarakat. karena alasan sederhana bahwa agama dan modernitas saling menguatkan. Agama sebagai institusi sosial berkembang sebagai respons terhadap perubahan keadaan dan keadaan di mana orang hidup. Modernisasi mencakup berbagai perspektif filosofis yang berdampak pada praktik perjuangan dan beberapa aspek kehidupan keagamaan lainnya.

Agama berpotensi mendorong dan mencegah kemajuan masyarakat. Ini karena cita-cita agama sudah mendarah daging dalam perilaku manusia sebagai cara hidup. Agama mungkin bersifat ekspansif, menarik banyak orang terlepas dari geografi atau waktu, namun juga bisa menjadi intens, memungkinkan kontrol atas pengetahuan dan

tindakan. Agama adalah kekuatan ideologis yang paling meresap di semua masyarakat. Orientasi agama memungkinkan individu untuk menentukan apa yang dianggap baik atau salah dan memandu aktivitas kolektif.

Masyarakat mematuhi dan menerapkan norma-norma tertentu seperti norma agama, interaksi sosial, dan interaksi sosial antara orang-orang dan kelompok sosial untuk mendukung standar yang ditetapkan seperti norma agama dan sosial. -adat dan konvensi sosial. Menurut sosiologi, salah satu tugas individu dalam masyarakat adalah menunjukkan kemampuannya untuk mengikuti aturan dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Individu yang tidak mampu mematuhi aturan disebut sebagai pelanggar norma.

Untuk menjaga ketertiban sosial, norma-norma sosial berfungsi sebagai pedoman interaksi sosial. Dengan demikian, struktur hubungan keagamaan dan komunal, baik organisasi maupun keagamaan, memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Agama, sebagai panutan bagi masyarakat, digunakan untuk membimbing dan mengatur standar sosial. Karena masalah agama terkait erat dengan kehidupan masyarakat dan karena agama diperlukan untuk kehidupan sosial.

B. Pengertian Teori Fungsional

Teori fungsional merupakan teori yang mengkaji lingkungan masyarakat, termasuk bagian dari tatanan sosial yang mempunyai fungsi tertentu dan saling berhubungan antara satu individu dengan lainnya. Misalnya dalam hubungan keluarga, kebudayaan, dan mencakup dalam agama. Konsep Fungsional merupakan suatu teori sosial yang mengkaji bahwa, secara struktur masyarakat dapat dipahami dengan melihat sebagai suatu analisis sistem sosial, dan sub sistem sosial, dengan pandangan bahwa pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural (Munir Fuady, 2013).

Fungsional melihat sistem sosial dari bagian-bagian kecil masyarakat yaitu individu, yang mana masyarakat sama-sama bekerja untuk mewujudkan stabilitas sosial dan tatanan sosial yang stabil. Menurut Emile Durkheim, masyarakat terdiri dari banyak bagian yang masing-masing memainkan fungsi tertentu. Namun, jika setiap bagian bergerak secara independen, organisme akan berhenti beroperasi (Barnwell, 2018).

Menurut teori fungsional, masyarakat adalah lembaga sosial yang berada dalam keadaan teratur atau seimbang, di mana banyak sistem dan komponen yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsinya sendiri, beroperasi dan mendukung satu sama lain agar masyarakat dapat terus

berkembang. Karena masyarakat merupakan institusi yang kompleks, maka dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dimana setiap komponen saling berhubungan satu sama lain, dan perubahan pada satu komponen dapat berdampak pada komponen lainnya, yang kemudian dapat mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan.

Dalam sistem sosial, fungsional, menurut Emile Durkheim, bekerja sama dengan sistem organik. Konstruksi masyarakat sebagai akibat dari norma atau pranata budaya, seperti kepercayaan dan adat istiadat. Fungsionalisme memandang masyarakat secara keseluruhan dan aspek-aspek komponennya, seperti norma, praktik, tradisi, dan institusi (Pip Jones, 2009).

Agar peradaban dapat bertahan hidup, ada empat kebutuhan esensial yang harus dipenuhi. Adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan penundaan adalah beberapa peran yang harus dilakukan masyarakat (AGIL).

1. Kemampuan beradaptasi (adapatio). Manusia harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau lingkungan dengan dirinya sendiri, agar dapat hidup.
2. Mencapai tujuan Anda. Suatu sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Integrasi mengandung pengertian bahwa masyarakat harus mengelola interaksi antar konstituennya agar dapat berjalan dengan baik.
4. Pemeliharaan pola atau latency yang sudah mapan Setiap budaya, misalnya, harus memper-tahankan, meningkatkan, dan menyegarkan dirinya sendiri, baik dalam hal dorongan individu maupun pola budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi.

Hipotesis fungsionalisme mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk menjaga sistem sosial tetap bertahan (Hisyam, 2020). Variabel individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja, dan nilai atau standar yang berlaku adalah semua aspek sistem sosial yang harus diperhatikan. Prinsip utama fungsionalisme adalah sudut pandang holistik, lengkap, yang menekankan kontribusi bagian-bagian untuk pemenuhan tujuan keseluruhan, serta kontinuitas dan harmoni berdasarkan nilai-nilai yang mendasari bersama.

C. Peran Teori Fungsional Emile Durkheim Dalam Memahami Agama

Teori fungsionalis, memandang kebutuhan itu sebagai hasil dari tiga karakteristik dasar eksistensi manusia, karena manusia membutuhkan referensi transendental, sesuatu yang berada di luar dunia empirik. Tiga karakteristik eksistensi manusia yaitu: (Tualeka, 2017)

- 1) Eksistensi manusia ditandai oleh rasa ketidak-pastian dalam menghadapi alam
- 2) Kemampuan manusia untuk mengendalikan alam sangat terbatas, sehingga timbul konflik antara ketidakberdayaan dan keinginan
- 3) Manusia merupakan makhluk sosial dengan alokasi kelangkaan fasilitas, yang meimbulkan perbedaan distribusi barang, nilai, dan norma hidup.

Jadi fungsional memandang agama sebagai pembantu manusia untuk menyesuaikan diri dari ketiga karakteristik manusia yaitu ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan. Agama dalam artian ini dipandang sebagai mekanisme penyesuaian yang paling dasar terhadap unsur-unsur yang mengecewakan dan menjatuhkan.

Sosiologi agama yang menurut Durkheim dalam karyanya *The Elementary Form of the Religious Life* memiliki tiga prinsip objektif yaitu Pertama, sosiologi agama pada dasarnya bertujuan menganalisa agama-agama termasuk yang paling sederhana (primitif), yaitu totemis suku Aborigin di Australia. Dengan tujuan untuk menentukan bentuk-bentuk paling elementer dari aktifitas keagamaan. Elementer yang dimaksud di sini bukanlah asal-usul primer secara historis, akan tetapi bentuk-bentuk yang secara struktural menjadi basis dan landasan.

Menunjukkan akar dari ide-ide kognitif penting. Emile Durkheim, misalnya, mengatakan bahwa konsep-konsep dasar seperti waktu, ruang, dan kausalitas, serta bentuk-bentuk struktur sosial, dibentuk bukan oleh pengalaman dan penelitian individu, tetapi melalui proses komunal dan sosial. Ketiga, kajiannya terhadap totemisme dimaksudkan untuk memberikan generalisasi tentang sifat dan fungsi universalitas agama dalam segala bentuk hubungan sosial. (Wibisono, 2020).

Pendekatan fungsional dari fungsi agama terdiri atas dua dimensi yaitu individu dan sosial. Secara individual agama memiliki fungsi sebagai penyedia makna (*meaning function*) dan fungsi identitas (*identity function*). Dalam kehidupan sosial makna yang diberikan agama terhadap keadaan-keadaan yang dihadapi manusia sangatlah penting dalam menjaga integritas. Makna yang diberikan agama berfungsi menekan sedemikian rupa perasaan-perasaan kegagalan dan penderitaan yang di alami oleh manusia sehingga tidak menyebabkan gejala yang membahayakan keutuhan sebuah masyarakat. Secara naluriah manusia ingin diakui dan dianggap memiliki identitas dan jati diri. Identitas diri manusia bukan hanya sekedar identitas fisik dan *performance* belaka, tetapi juga identitas kepribadian, keyakinan dan pandangan hidup

Kajian agama secara fungsional menghubungkan fungsi agama atau praktik religius dalam kehidupan individu maupun

kelompok dengan aturan hukum yang melegitimasi tindakan sosial. Fungsi agama bagi setiap individu yaitu sebagai identitas diri yang menyediakan petunjuk dalam pandangan hidup. Paham fungsionalisme ini mencoba mendefinisikan agama secara fungsional karena ketidakpuasan terhadap definisi agama secara substantif. Kajian Emile Durkheim menyatakan agama sebagai salah satu bentuk fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu (Gunawan Adnan, 2020).

Emile Durkheim, seorang filsuf sosiologi Prancis, dipuji karena mencetuskan pemikiran keagamaan. Agama, menurut Emile Durkheim, adalah kebenaran sosial yang memainkan peran penting dalam integrasi sosial. Menurut Emile Durkheim, agama adalah sistem sosial yang mengembangkan hubungan sosial antara orang dan kelompok. Kebersamaan sosial semacam ini muncul dari nilai dan gagasan bersama, dan juga terkait dengan pengalaman emosional umat beragama.

Menurut Emile Durkheim, keyakinan agama berfungsi sebagai pemisah antara individu, tetapi Tuhan dipandang sebagai idealisme masyarakat, objek paling sempurna di antara hewan. Akibatnya, agama didefinisikan sebagai fungsional oleh Emile Durkheim, karena masyarakat dikaitkan dengan cita-cita yang harus dijunjung tinggi (Gunawan Adnan, 2020).

Menurut Emile Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan dan perilaku yang berkaitan dengan benda-benda

suci, yaitu ide-ide dan perilaku yang dipisahkan dan dilarang yang mengikat semua orang percaya ke dalam satu komunitas moral, terutama didirikan pada nilai-nilai bersama, yang dikenal sebagai rakyat. Dengan kata lain, agama wajib bagi mereka yang tidak ingin berpisah.

Emile Durkheim mengikuti agama yang paling sederhana dan paling mendasar. Karena orang-orang di alam liar tidak pernah menganggap alam dan alam gaib sebagai entitas yang terpisah. Asumsi sains tidak berpengaruh pada peradaban primitif, tetapi asumsi sains berpengaruh pada masyarakat kontemporer.

Dibandingkan dengan agama-agama lain yang muncul setelahnya, Emile Durkheim berpendapat bahwa agama primitif lebih bermanfaat dalam menggambarkan esensi religius kemanusiaan. Karena agama primitif dapat mengungkapkan karakteristik manusia yang paling mendasar dan abadi. Agama primordial ini memenuhi syarat yang sama, menjalankan fungsi yang sama, dan mengikuti jalan yang sama dengan agama-agama lain, serta mampu menjelaskan hakikat kehidupan beragama (Wahono, 2000).

D. Konsep Beragama Masyarakat Modern

Pada era modern paham positivisme yang dipelopori oleh filsuf Perancis, Auguste Comte memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan agama. Pada tahap ini kesadaran manusia

mengenai gejala-gejala alam yang terjadi karena adanya hukum alam, bukan karena adanya dewa-dewa atau Tuhan. Pandangan ini sama dengan paham sekularisme Barat yang me-ngeyampingkan peran Tuhan pada dalam peradaban, agama dipandang tidak relevan bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga cara pandang terhadap agama pun mengalami pergeseran. Tetapi berbeda halnya dengan para sosiologi yang menempatkan perhatiannya pada pengaruh agama terhadap masyarakat, cenderung berlomba untuk menelaah kehidupan sosial masyarakat yang masih percaya pada agama.

Kajian ilmu sosiologi di era modern ditandai munculnya teori-teori klasik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya yaitu Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Emile Durkheim mempublikasikan pandangannya tentang agama dalam *The Elementary forms of religius life*, Max Weber mengemukakan pandangannya terhadap agama dalam *the protestant ethnics and the spirit of capitalism*, sedangkan Karl Max menulis teorinya tentang agama dan kehidupan sosial dalam karyanya yang berjudul *critics of hegel's philosophy of right introduction* (Gunawan Adnan, 2020).

Para ilmuan tentang sosiologi agama pada zaman era modern lebih menggambarkan kondisi dimana Eropa telah berada pada abad pencerahan (Bernard Raho, 2007). Pada saat itu, terjadinya ketidakstabilan kelompok masyarakat yang

religius mencoba mempertahankan tatanan yang ada terutama masyarakat yang ingin kembali pada tatanan lama yang berusaha mendefinisikan kembali peran agama dalam masyarakat dengan menunjukkan fakta-fakta yang belum diketahui sebelumnya. Masyarakat melakukan rekonstruksi ulang cara masyarakat memandang agama, yang mana wujud agama yang rusak selama memasuki abad pencerahan, bisa direkonstruksi dengan perspektif yang baru (Fauzi, 2017).

Dalam teori sosiologi, modernitas mengacu pada tahap perkembangan interaksi manusia atau merupakan situasi transisi dari tahap perkembangan sejarah peradaban. Emile Durkheim menekankan pentingnya agama dalam membangun tatanan moral, kohesi sosial, dan identitas pribadi dalam salah satu bukunya yang berjudul *The Division of Labor*. Implikasi moral dari modernisasi, khususnya bahaya terhadap tatanan sosial yang ditimbulkan oleh kebebasan individu yang berkembang, kemudian ditanggapi oleh Emile Durkheim.

Individu tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh perilaku komunal dan sejarah budaya; melainkan, mereka bebas mengembangkan kemampuan dan kepribadian bawaan mereka sebagai akibat dari modernitas. Dalam skenario ini, Emile Durkheim percaya bahwa modernisasi memiliki konsekuensi berupa keragaman agama dan kepercayaan, yang dapat merusak konsensus moral masyarakat dan mengarah pada perselisihan sosial.

Individualitas dan moralitas yang tidak terkendali memiliki pengaruh yang merusak pada kehidupan komunal, yang mengakibatkan identitas dan etika yang berbahaya. Perspektif pesimis dan optimistis tentang keterkaitan antara modernitas dan agama adalah dua perspektif sosiologis tentang agama. Fungsi agama dalam masyarakat kontemporer dipandang sebagai pesimisme dalam paham pesimisme Durkheim. Modernitas, menurut pandangan suram ini, menimbulkan bahaya besar bagi kelangsungan agama. (M. Rasyid Ridla, 2012).

E. Fungsionalisme dan Strukturalisme Dalam Lembaga Agama

Menurut pendekatan fungsional, peran sosial agama dibagi menjadi dua kategori: kultural dan struktural. Kesucian nilai dan standar sosial yang dianut dalam suatu masyarakat terkait dengan fungsi budaya agama. Cita-cita dan standar ini disucikan oleh agama, yang menawarkan landasan non-empiris. Sekularisasi agama terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat di atas landasan non-empiris untuk memegang kekuasaan atas ketertiban umum. Karena agama dapat mempromosikan dan memperkuat kepatuhan anggota masyarakat terhadap standar moral yang ditetapkan. (Sukardi, 2003). Bahkan agama memiliki kekuatan untuk memaksa individu mengikuti aturan sosial demi kebaikan masyarakat.

Norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang tegas dengan sanksi-sanksi yang sakral memiliki kekuatan memaksa dan istimewa. Karena norma-norma tersebut tidak hanya melibatkan ganjaran dan sanksi yang bersifat duniawi dan manusiawi, tetapi juga ganjaran sanksi yang supramanusiawi dan ukhrawi. Oleh sebab itulah fungsi sosial agama sebagai kerangka acuan yang sakral dan sebagai pemberi landasan metafisis dan supranatural non empiris bagi norma-norma dan nilai-nilai kultural yang dibutuhkan oleh masyarakat. dengan adanya landasan metafisis dan supranatural, agama membantu menghilangkan keraguan, dan anomie yang timbul pada setiap anggota masyarakat sehingga dapat membahayakan integritasnya.

Fungsi sosial agama kedua yaitu fungsi struktural, yang mana agama berperan sebagai struktur kelembagaan masyarakat. sebagai sebuah struktur sosial, agama berperan sebagai perekat dalam mempersatukan anggota-anggotanya ke dalam suatu himpunan komunitas, yang disebut Emile Durkheim sebagai komunitas moral. Agama berperan secara struktural dalam kehidupan masyarakat dengan cara menstabilkannya.

Melalui norma-norma dan nilai-nilai yang disakralkan, oleh karena itu agama mampu menciptakan stabilitas sosial yang memungkinkan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Nilai dan norma masyarakat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup

masyarakat itu sendiri. Karena ketertiban dan kelangsungan tersebut tergantung pada harapan yang terus menerus bahwa anggota masyarakat akan melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang masyarakat akui dan kenal.

Menurut Elizabeth K, Nottingham memiliki dua fungsi agama: pemersatu dan masyarakat tepat. Pertama-tama, agama telah membantu dalam perkembangan persetujuan terciptanya dalam bidang sifat dan kewajiban-kewajiban sosial. Agama membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh dalam peran ini (Sukardi, 2003). Kedua, ada alasan kuat untuk menyimpulkan bahwa agama telah memainkan peran penting dalam memberikan kekuatan koersif yang menopang dan memperkuat praktik dan norma masyarakat.

Awalnya, agama tidak digunakan untuk menentukan status sosial seseorang. Namun, ketika masyarakat semakin sadar akan agama, agama menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Agama mengembangkan rasa berharga dan signifikansi dalam kehidupan, dan sebagai hasilnya, agama dilembagakan dalam masyarakat dan berkembang menjadi agama sebagai institusi sosial. Berikut ini adalah peran lembaga sosial:

1. Menetapkan standar perilaku bagi para anggotanya.
2. Menjaga keutuhan masyarakat

3. Membantu masyarakat dalam membangun sistem kontrol sosial, yaitu metode yang digunakan masyarakat untuk memantau perilaku anggotanya (Soerjono Soekanto, 1999).

Kehadiran pranata sosial keagamaan dalam suatu masyarakat dapat membantu untuk lebih tertib, utuh, dan teratur, karena terikat oleh aturan-aturan yang dikenal, dipahami, dipatuhi, dan dihormati. Semakin berkembang atau kompleks suatu masyarakat, semakin banyak aturan yang diperlukan, menyiratkan bahwa institusi yang berkembang di masyarakat itu akan semakin rumit. Agama adalah salah satunya.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Teori fungsional merupakan teori yang menekankan unsur-unsur di dalam suatu masyarakat atau kebudayaan saling berhubung dan menjadi kesatuan yang berfungsi sebagai doktrin atau ajaran yang menekankan manfaat hubungan fungsional. Fungsionalisme melihat sistem sosial dari bagian-bagian kecil masyarakat yaitu individu, yang mana mereka sama-sama bekerja untuk mewujudkan stabilitas sosial dan tatanan sosial yang stabil.

Pendekatan teori fungsional terhadap agama menjadi penting dalam kaitannya dengan unsur-unsur pengalaman

manusia yang berasal dari ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan, yang merupakan karakteristik mendasar dari kondisi manusia, dan fungsi agama dapat dilihat dari sudut pandang empiris, praktis, dan sosiologis (Tualeka, 2017).

Menurut Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan dan perilaku yang berkaitan dengan benda-benda suci, yaitu ide-ide dan perilaku yang dipisahkan dan dilarang yang mengikat semua orang percaya menjadi satu komunitas moral, yaitu didirikan di atas nilai-nilai bersama (Barnwell, 2018).

Pada era modern ditandai dengan abad pencerahan di Eropa dan pada abad pencerahan terjadinya ketidakstabilan pada kelompok masyarakat yang religius mencoba mempertahankan tatanan yang ada terutama masyarakat yang ingin kembali pada tatanan lama yang berusaha mendefinisikan kembali peran agama dalam masyarakat dengan menunjukkan fakta-fakta yang belum diketahui sebelumnya. Masyarakat melakukan rekonstruksi ulang cara masyarakat memandang agama, yang mana wujud agama yang rusak selama memasuki abad pencerahan, bisa direkonstruksi dengan perspektif yang baru. Fungsi sosial agama menurut pendekatan fungsional memiliki dua macam fungsi yaitu fungsi kultural dan struktural.

DAFTAR PUSAKA

- Bernard Raho. 2007. "Bernard Raho.Pdf."
- Fauzi. 2017. "Fauzi.Pdf."
- Gunawan Adnan. 2020. "Gunawan Adnan, Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020)." 2020.
- Joko Santosa. 2019. "Pendidikan Agama Islam." *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan* 2(25):64–88.
- M. Rasyid Ridla. 2012. "SOSIOLOGI HUKUM ISLAM." *AL-Ihkam* 7(2):294–304.
- Munir Fuady. 2013. *Munir Fuady.Pdf*
- Soerjono Soekanto. 1999. "Soerjono Soekanto.Pdf."
- Sukardi, Imam. 2003. "Imam Sukardi.Pdf."
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 3(1):32–48.
- Wahono, Satrio. 2000. "Satrio Wahono, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen Dan Yahudi, (Bandung: Mizan & Serambi Ilmu Semesta, 2000)." 2000.
- Wibisono, Yusuf. 2020. "M. Yusuf.Pdf."

MEMBUMIKAN MORAL BERPOLITIK NABI MUHAMMAD DI ERA 4.0: SUATU KAJIAN SOSIO RELIGIUS



FAUZI ISMAIL

A. Pendahuluan

Perkara politik sangatlah menarik untuk dibicarakan karena tentang politik ini berkaitan dengan kekuasaan atau *power*. Muh Kurdi Ali menyebutkan dalam bukunya bahwa politik dalam sejarah Islam adalah kebutuhan bangsa dan umat akan politik sama dengan kebutuhan manusia dengan udara dan air. Muh Ali Kurdi juga menegaskan arti tersebut dengan menyebutkan bahwasanya Umat Muslim akan mendapatkan kejayaanya kembali, maka dengan demikian itu harus melalui

dan mendalami ilmu politik baik dari pengetahuan ataupun keahlian (Elvandi, 2010).

Singkatnya, bahwa makna penting politik bagi seluruh Muslim adalah asas kebutuhan umat Muslim untuk kembali bangkit dari keterpurukan umat Muslim dari peradaban Barat. Politik dalam pandangan Islam harus selalu digali dengan teliti, yang memungkinkannya ditemuka susunan atau bentuk dari politik Islam yang mumpuni. Menilik dari perdaban Islam, politik Islam telah dimulai dari Zaman Nabi Muhammad sebagai pemimpin Umat Muslim di era itu. Nabi Muhammad memulai era kepemimpinannya pada periode Mekkah yang kemudian dilanjutkan oleh periode Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap awal tersebut untuk menghasilkan masyarakat Islam. Masa peradaban sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad ini sebagai akar dari lahirnya politik Islam, serta kemudian akan dilanjutkan dengan perkembangan selanjutnya untuk menyempurnakan perjalanan kehidupan umat Muslim (Syam, 2018).

Moral atau etika politik kepemimpinan Islam ataupun kepemimpinan diluar Islam sangat bergantung oleh pemimpin atau penguasanya. Semua umat pasti menghendaki sebuah pemerintahan yang berdasarkan etika serta adil, jika demikian itu maka harus banyak mengkaji kenyataan yang terjadi dengan mengangkat tinggi aksiologi keadilan, sehingga dapat terwujudnya kedamaian. Etika serta keadilan berpolitik tentunya sudah diajarkan Nabi Muhammad dalam praktiknya

memimpin umat Islam pada zaman dulu, namun nyatanya yang kita dilihat di zaman sekarang umat Muslim mendapatkan berbagai macam krisis, baik itu dari segi keamanan, ekonomi dan juga krisis. Maraknya terjadi kejahatan, dari mulai korupsi, tindak asusila, pembunuhan dan lain-lain. Jika demikian, jauh sekali dari ajaran Rasulullah tentang berpolitik dan memimpin Negara.

B. Moral Berpolitik Nabi Muhammad

1. Definisi Moral dan Politik

Moral adalah sebutan untuk menyebut manusia lain terhadap perilaku yang mempunyai *positive value*. Manusia yang kurang berakhlak sering disebut dengan immoral, yang menunjukkan bahwa mereka tidak bermoral dan tidak memiliki nilai yang baik dalam pandangan orang lain. Bahasa moral berasal dari bahasa Latin, khususnya mos, dan bentuk jamaknya adalah mores, yang berarti konvensi atau peraturan. Moral dalam KBBI diartikan sebagai akhlak, akhlak, budi pekerti, dan budi pekerti.

Sementara itu, ada beberapa ahli yang mendefinisikan akhlak; Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai padanan kata moral, yaitu sebagai perangai atau tabiat yang melekat pada diri manusia yang berfungsi sebagai katalisator timbulnya suatu perbuatan yang akan dilakukan manusia itu dengan ringan dan tanpa usaha, tanpa ragu-ragu atau

berencana. Kemudian Bambang Daroeso mendefinisikan moral sebagai alat yang memfasilitasi pembentukan gagasan tentang perilaku manusia melalui penggunaan karakteristik fundamental tertentu yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam ruang lingkup yang ditentukan, dan moral adalah doktrin tentang perilaku hidup yang benar berdasarkan pandangan dunia atau ajaran agama. (Abdul Muin Salim, 2002)

Politik secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani; *polis* yang diartikan negara atau kota. (Abdul Muin Salim, 2002) Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Sedangkan dalam Bahasa Prancis disebut dengan *Politique* yang artinya kebijaksanaan. Jika ditilik dari segi istilah banyak sekali yang mendefinisikan pengertian politik. Yusuf Qardhawi mengatakan; politik adalah mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan baginya (Qardhawi, 2008).

Politik, menurut para ahli terdahulu, memiliki dua definisi. Yang pertama, dalam arti luas, adalah pengaturan urusan manusia dan aktivitas dunia manusia melalui aturan agama. Kedua: pemahaman khusus adalah posisi atau seperangkat undang-undang dan ketentuan yang didukung oleh seorang pemimpin dalam upaya untuk mencegah bahaya yang akan datang atau untuk menemukan solusi untuk keadaan tertentu. (Jasiman, 2012).

Deliar Noer mengemukakan pendapatnya dalam mendefinisikan politik, ada dua pendekatan; pertama, pendekatan yang menegaskan terhadap nilai. Kedua, pendekatan yang menegaskan terhadap perilaku. Pendekatan tersebut meliputi juga nilai-nilai yang sejalan dengan etika dalam menetapkan system pemerintahan baik atau buruknya seperti yang digunakan oleh pakar politik. Singkatnya, segala sikap yang berhubungan dengan segala bentuk kekuasaan atau aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah ataupun mempertahankan suatu macam bentuk tatanan masyarakat itu disebut dengan politik. (Maloko, 2013)

Hakikat politik sebenarnya berpegangan kuat dengan fitrah manusia, kekuasaan, kepemimpinan dan perlindungan. Satu, politik adalah fitrah bagi manusia, bahwa sudah menjadi kebiasaan bah-wasanya diantara kelompok manusia terdapat satu pemimpin yang dibanggakan serta dihormati karena keunggulannya, baik itu unggul dalam kekuatan dan keberanian ataupun unggul dalam kecerdasan dan kebijaksanaan. Figure pemimpin seperti itulah yang diimpikan setiap rakyat serta sosok seperti itu yang akan mampu melindungi rakyatnya. (Jasiman, 2012) Yang kedua, politik adalah kepemimpinan. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam kacamata Islam, setiap manusia adalah seorang pemimpin. Ketiga, politik adalah perlindungan. Perlindungan yang diharapkan seluruh rakyatnya dari seorang pemimpin dari segala sesuatu yang

bersifat merugikan dan keburukan. Terakhir, politik adalah kekuasaan, yang mana kekuasaan tersebut dangan tidak bisa dipisahkan dari struktur kemanusiaan dan juga politik. (Jasiman, 2012).

C. Ketika Nabi Muhammad Berpolitik

Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diwahyukan Allah kepadanya Al-Qur'an. Nabi Muhammad adalah peletak dasar system kemanusiaan yang berdasarkan pada universalisme Islam. Hadirnya Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik sangat berperan untuk menukar pertalian kesukuan atau *nasab* dengan pertalian spiritual atau *ummah*. Narasi perjuangan Nabi Muhammad dalam membangun dan memimpin agama Islam di Mekkah dan Madinah mengandung esensi etika politik yang sangat relevan serta ideal untuk diaktualisasikan dalam konteks berpolitik pada era ini. Orientasi politik yang didahulukan Nabi adalah berdasarkan pada budi pekerti atau akhlak dalam membangun komunikasi politik dengan publik.

Secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemashlahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Pandangan politik menurut *syara'*, realitanya pasti berkesinambungan dengan masalah mengatur urusan rakyat. Hanya saja setiap ideologi punya pandangan tersendiri tentang hukum dan aturan mengatur sistem politik. Dalam

segi konteks politik serta kekuasaan, Islam selalu mementingkan kesadaran kolektif bahwa puncak dari kekuasaan dan politik adalah *siyasaḥ ilāhiyyah wa inābah nabawīyyah* yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya kepada Allah. Pandangan ini sejalan dengan politik keadilan yang memberikan kekuatan kepada pemerintahan Islam dari zaman Nabi sampai sekarang (Zawawi, 2015).

Sistem pemerintahan Nabi Muhammad didasarkan pada gagasan '*al-mujtama' al-madani*' atau masyarakat madani Islam, yang menghasilkan sistem nilai yang terkait dengan '*al-hanafīyyah al-samḥah*' atau tradisi Islam murni. dan luas, pada hakikatnya Islam dengan sifat yang mudah dan ringan, yang merupakan tujuan dari *siyasaḥ syar'īyyah*, yang menghubungkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah universal. Pemerintahan Nabi melahirkan perspektif global dengan tujuan menumbuhkan pemahaman antara elit dan rakyat melalui tindakan kolektif berbasis konsensus yang mencakup dimensi moral dan nilai-nilai keberadaan yang bermartabat dan mulia. (Nurrohman, 2011).

Pembangunan asas-asas politik pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang yang luas bagi transformasi peradaban yang berlandaskan pemikiran dan juga ilmu pengetahuan (Amin, 2017). Dilihat dari sejarah bahwasanya Nabi Muhammad mulai berpolitik di kota Makkah dengan para sahabat beliau untuk mengumpulkan semangat juang dakwah. Bahkan pada saat Nabi di Makkah Nabi masih melakukan

hubungan dengan para sahabat di Yatsrib. Pada saat itu ada 6 orang yang telah masuk Islam. setelah Nabi berdakwah di Mekkah beliau berhijrah ke Madinah. Perjuangan politik islam pada saat itu ditandai dengan setelah berlangsungnya peristiwa bai`at aqobah. Hal ini adalah suatu pencapaian yang gemilang dengan melihat bahwasanya Islam yang dulu masih dipenuhi dengan kekufuran. Nabi Muhammad memang sangat cerdas dalam berpolitik, ini terbukti dalam pemilihan beliau mencari tempat Hijrah, yaitu Madinah. para kaum Quraisy pada saat itu semakin geram karena mereka tahu bahwasanya kota Madinah adalah tempat yang sangat strategis untuk berdagang. Dan karena sebab itu penjuru dunia akan pergi ke Madinah untuk berdagang serta masyarakat Madinah pun pergi ke luar untuk membawa barang dagangan (Amin, 2017).

Dalam rencana Rasulullah membangun politik di Madinah, Rasulullah memulai dengan mempersaudarakan masyarakat Madinah yang multicultural; yaitu kaum Muhajirin dan Kaum Anshar. Rasulullah menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi untuk mengganti asas sosial penduduk Madinah yang sangat fanatic dengan kesukuan. Hubungan persaudaraan yang berlandaskan Islam tidak diartikan hanya dengan persaudaraan antar sesama Muslim. Namun juga persaudaraan yang mencakup segala lingkup masyarakat yang menyatakan janji setia kepada Rasulullah sebagai pemimpin. Puncak kesuksesan Nabi Muhammad dalam berpolitik adalah

dengan perdamaian yang terjadi pada tahun 690 Masehi. Sesudah dengan pembebasan kota Mekkah dan perang Tabuk. Sikap bijaksana Nabi Muhammad menjadi pemimpin politik di Madinah menciptakan kekuatan yang sangat kuat untuk menarik perhatian bangsa Arab untuk datang ke Madinah hanya agar dapat memeluk agama Islam, itu semua dikarenakan Islam akan selalu melindungi umatnya dengan panji-panji Islam yang berlandaskan persamaan dan keadilan (Suwanto dan Rahmat Hidayat, 2020).

D. Berpolitik di Era 4.0

Pada era 4.0 yang biasa disebut dengan revolusi industri ini tentu saja menjadi tantangan yang berat untuk berpolitik dengan mengamalkan praktik Rasulullah. Sebelumnya perlu diketahui bagaimana industri 4.0 ini bekerja. Pada era ini revolusi industri mengubah cara kerja institusi dan organisasi public beroperasi. Dari sini tatanan pemerintah local, nasional maupun internasional dituntut untuk beradaptasi membentuk ulang tatanan dengan menemukan cara-cara baru untuk berkolaborasi dengan masyarakat dan *sector private*. Revolusi 4.0 ini juga mempengaruhi hubungan antar pemerintahan dan antar negara. Revolusi industri ini mengubah tanggapan tradisional atas politisi dan lakon mereka di masyarakat (Suwanto dan Rahmat Hidayat, 2020).

Pembaharuan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, maka di revolusi industry yang semuanya telah berubah dari mulai bioteknologi, digital, kecerdasan buatan dan lainnya. inovasi-inovasi tersebut telah mendefinisikan ulang arti manusia. Inovasi-inovasi tersebut juga menjadikan suatu batasan-batasan kita tentang kesehatan, dan usia hidup serta kemampuan lainnya yang sebelumnya hanya ada di genre fiksi ilmiah.

Seiring dengan berkembangnya penemuan dan pengetahuan dibidang tersebut, perihal etika dan moral sangatlah penting. Manusia sebagai makhluk sosial akan berpikir mengenai bagaimana merespon persoalan yang terjadi akibat revolusi industry ini. Penemuan-penemuan yang menakjubkan dapat dimanipulasi untuk berbagai kepentingan tertentu. Dampaknya dari teknologi digital yang sangat canggih di era ini membangkitkan jiwa-jiwa kecurangan manusia untuk memanipulasi dan menjalankan triknya dalam perihal politik, pencucian uang dan lain sebagainya (Jasiman, 2012).

Tegasnya, dengan adanya revolusi industry 4.0 yang telah mengubah semua system dan paradigma manusia di muka bumi menjadikan tujuan politik yang sebenar-benarnya menjadi hilang kendali. Yang awalnya tujuan politik yang diajarkan Rasulullah adalah untuk membangun dan membina system pemerintahan dan negara yang tegak dan sejalan dengan hukum syariat Islam, memelihara dan melaksanakan proses

pengadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip umat Islam, serta menjaga dan mengendalikan hal ihwal demi melindungi negara. Politik adalah pemikiran yang berupa tuntutan, keyakinan hukum dan informasi. Prinsip politik yang dicontohkan Rasulullah ialah menjunjung tinggi nilai musyawarah, menjalankan amanah, menetapkan hukum secara tepat dan adil. Menepati janji dan tidak berbohong demi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Mubasyaroh, 2018).

Berpolitik di era 4.0 ini sudah dapat kita pantau bahwa terjadi jarak pemisah antara negara dan agama. Para petinggi liberal menuntut para Ulama untuk merampungkan masalah keagamaan dan keulamaan dan menyerahkan kepengurusan tentang kenegaraan kepada para politisi. Menjalankan negara Syari'at tidak diperbolehkan karena itu dapat menarik para masyarakat Islam di seluruh penjuru negeri akan menjadi negara yang totaliter.

Para petinggi liberal beranggapan bahwa apa yang sesuai dengan Rasulullah pada tempo dulu belum tentu benar di zaman sekarang ini. Padahal pada kenyataannya al-Qur'an serta sunnah telah membahas tingkatan tentang budaya serta pemerintahan yang tinggi dan gemilang untuk seluruh cakupan umat Muslim. Ada beberapa negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim mengusulkan untuk mengubah system pemerintahan negara dengan model Madinah. beberapa meyakini bahwa pemerintahan model

Madinah dan al-Quran dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi umat dan bangsa (Abdul Muin Salim, 2002).

E. Membumikan Moral Berpolitik Nabi Muhammad

Zaman sekarang yang serba canggih ini menjadikan kita lupa siapa sebenarnya panutan sesungguhnya. Nabi Muhammad telah mengajarkan bagaimana berperilaku, bagaimana beretika dalam berpolitik. Namun pada kenyataannya tidak banyak mungkin hampir tidak ada yang menerapkan gaya atau style berpolitik Rasulullah. Kemajuan revolusi industry membuat para pemanggu pemerintahan terlena dalam menjalankan politik saat ini. Pemicu dari ini semua bisa jadi dari 'gila jabatan' atau *'addicted respect'* atau biasa disebut gila hormat.

Pada masa Rasulullah menjadi pemimpin, Rasulullah sadar betul bahwa posisi beliau menjadi kepala negara harus bertindak tegas, maka dari itu Rasulullah sering melakukan kesepakatan bersama. Rasulullah bermusyawarah Bersama dengan rakyat untuk membentuk tatanan pemerintahan yang tida membedakan agama, golongan, ras dan suku agar terciptanya keadilan. Rasulullah mencetuskan piagam Madinah dengan asas-asas yang telah disepakati bersama, yaitu; pertama, semua masyarakat Muslim, menjadi satu komunitas walaupun dari berbagai suku yang berbeda. Kedua,

masyarakat Muslim dengan masyarakat Muslim yang lain dan Masyarakat Muslim dengan non-Muslim tetap berhubungan dengan prinsip-prinsip yang disepakati, diantaranya; (1) saling menghormati dan baik dalam bertetangga. (2) saling menolong dan membantu untuk menghadapi para musuh. (3) membela dan mendukung untuk mereka yang sedang teraniaya dan terancam. (4) saling memberi nasehat. (5) saling toleransi dan menghormati agama lain (Nurrohman, 2011).

Kita dapati di era sekarang, hampir semua negara menerapkan pemerintahan yang berbasis demokratis. Ada beberapa negara yang juga mempraktekkan demokrasi ini yang ujung-ujungnya menjadi anarkis. Khalid Muhammad menerangkan di dalam bukunya yang berjudul Agama Meluruskan Bangsa bahwa kesesuaian antara Demokrasi dan Agama Islam adalah mengemukakan bahwasanya hak-hak makhluk adalah hak-haknya Allah Swt. Wujud langsung dari pemeliharaan hak-hak Allah adalah berkesinambungan dengan penghormatan serta penghargaan kepada sesama umat manusia. Agama Islam juga sangat menentang akan adanya feodalisme.

Namun nyatanya yang kita temui di negara yang sangat demokratis ini banyak terjadi feodalisme dan bahkan para petinggi pun ikut membela. Sebenarnya para feodalisme tersebut tidak pantas ditoleransi dan dihargai karena mereka pun tidak menghargai orang lain. Bagaimana bisa para pemimpin membiarkan mereka menguasai hasil bumi, seperti

tanah, batu bara, gas bumi dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang telah bekerja untuk itu semua tidak mendapat apa-apa dari jerih payahnya. Ini semua adalah sebab pemimpin yang tidak mengedepankan etika dan moral, sehingga dia bermain politik dengan tidak benar dan menjadikan bangku politik sebagai taman kebahagiaan bagi diri sendiri dan golongannya (Syam, 2018).

Sebenarnya pemerintahan bersistem demokratis ini adalah dambaan setiap bangsa negara. Karena masyarakat bukan barang yang dapat diperjual belikan, atau harta yang dapat diwariskan turun temurun atau juga sapi yang diperah susunya. Semua manusia yang terlahir ke bumi adalah manusia-manusia merdeka yang dapat memilih tujuan hidupnya. Selama masyarakat masih membutuhkan figure pemimpin yang mengatur segala kebutuhan mereka, maka pemimpin itu harusnya terlahir dari rakyat. Yang harus betul-betul bisa memberikan rasa damai dan aman, dapat bekerjasama serta bertanggung jawab dan tulus mengabdikan diri kepada agama dan negara maka dengan itu negara demokratis akan tercipta dengan baik. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada system demokratis ini namun dalam praktiknya Rasulullah sudah mewujudkan dalam bentuk musyawarah, keadilan bagi seluruh masyarakat, menghargai HAM dan Rasulullah sangat bertanggung jawab terhadap kepentingan umat (Jasiman, 2012).

Rasulullah dalam berpolitik dan menjadi pemimpin berprinsip dan menerapkan konsultasi dengan masyarakat. Walaupun Nabi Muhammad sebagai Rasul namun dalam menetapkan sebuah keputusan beliau selalu menanyakan pendapat rakyat. Rasulullah juga sangat lapang dalam menerima kritik dan saran dari sahabat serta kerabatnya. Bahkan beliau terkadang membatalkan atau menarik pendapat beliau pribadi. Rasulullah selalu menanamkan dan mengajarkan para sahabat beliau agar bersikap adil dalam menerapkan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat. HAM juga ditonjolkan Rasulullah dalam memimpin, agar terciptanya kebebasan dalam beragama, kemerdekaan dalam berbicara, dan kebebasan dalam mencari rezeki dan lain sebagainya (Daroeso, 1986).

Ada beberapa prinsip yang sudah diajarkan Rasulullah dalam berpolitik, yang mana ajaran ini sudah disebutkan di dalam al-Quran dan Sunnah, diantaranya; penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan itu adalah amanah, mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, selalu bermusyawarah dan mendengarkan pendapat dari rakyat, dan lain-lain. Jika prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka akan menimbulkan moral serta etika pemimpin buruk. Menjadikan pemimpin yang suka korupsi karena terlalu berambisi akan mendapatkan harta dan uang yang berlimpah.

Kemudian, moral dan etika pemimpin yang buruk akan menjadikan pemahaman agamanya sebagai pengendali dalam melakukan suatu perbuatan dan Tindakan. Jika lemah pemahaman agamanya maka pemimpin Ketika berpolitik tidak akan memperhatikan nilai-nilai moral serta etika. Kemudian, jika pemimpin tidak bermoral maka rasa tanggung jawab pada dirinya tidak ada. Berkuasa bukanlah memegang setir politik sambil menindas rakyat, namun harus bertanggung jawab kepada agama, rakyat, negara, serta bangsa (Maloko, 2013).

Al-Quran adalah sumber panutan moral berpolitik. al-Quran menjadi konsep etika, dimana etika tersebut menuntun agar hidup dengan baik. Al-Qur'an mengajarkan bagaimana seorang pemimpin yang harus bersikap lemah lembut serta tidak menyakiti hati orang lain baik itu dari perkataan atau tindakan. Al-Qur'an menegaskan juga bahwa seorang pemimpin harus memberikan rasa ketentraman dan mengajak para rakyat untuk melakukan musyawarah dalam setiap rencana. Agama adalah system nilai yang memang diyakini keabsahannya. Rasulullah sudah menjelaskan juga bahwa al-Qur'an adalah sumber gagasan politik yang baik, pemimpin yang baik tercipta dari nilai luhur agama. Singkatnya selama pemimpin menjalankan politik sesuai dengan ajaran al-Quran dan sunnah maka pemimpin tersebut akan bertindak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad dan negara akan menjadi damai tentram sesuai dengan kehendak umat semua (Abdul Muin Salim, 2002).

F. Penutup

Membumikan moral berpolitik Rasulullah adalah menerapkan segala ajaran dan tata cara yang sudah diajarkan Nabi Muhammad dalam praktik beliau menjadi pemimpin pada tempo dulu. Pengertian moral itu sendiri adalah: akhlak atau budi pekerti. Sedangkan pengertian politik itu sendiri adalah: mengatur urusan manusia, negara atau bangsa.

Kenyataannya yang kita lihat sekarang pada revolusi industry 4.0 ini banyak sekali pemimpin yang tidak menjalankan politik yang sehat. Rata-rata pemimpin sekarang menjadi gila jabatan dan ambisi mengejar harta sehingga hanya berpangku tangan menikmati sumber daya alam dan mengabaikan kepentingan rakyat. Semua yang dicontohkan Rasulullah dianggap tidak relevan dengan zaman sekarang yang sebenarnya sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai al-Qur'an yang tinggi selalu dapat diterapkan disepanjang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim. (2002). *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al- Qur'an*. 2002.
- Amin, S. (2017). Identitas Politik Islam Masa Nabi Muhammad dan Khulafa Al-Rasyidin. 2017.
- Bahar, H. M., & Teng, A. (2017). Filsafat Kebudayaan Dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah). 5(1), 2354–7294.
- Barnwell, A. (2018). Durkheim as affect theorist. *Journal of Classical Sociology*, 18(1), 21–35. <https://doi.org/10.1177/1468795X17702917>
- Bernard Raho. (2007). *Bernard Raho.pdf*.
- Buana, R. D. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Chairi, A. N. (2017). PERSPEKTIF AGAMA ISLAM TERHADAP KELUARGA SEHAT DI KOTA MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI JAMBI TAHUN 2017. 6(01).
- Dadang Kahmad. (2009). *Sosiologi Agama*. 2009.
- Dany Haryanto, S. . dan G. E. N. (2011). Dany Haryanto, S.S dan G. Edwi Nugroho, (2011). Pengantar Sosiologi Dasar , (Jakarta: PT. Prestas Pustakarya. 2011.
- Daroeso, B. (1986). Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila, Semarang: Aneka Ilmu, 1986. 1986.
- Dr. Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa.

- Dwi Narwoko. (2007). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. 2007.
- Elly M. Setiadi. (2011). Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi., Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Elly M. (2011). Pengantar Sosiologi.
- Elvandi, M. (2010). Muhammad Elvandi, Lc.
- Erfan Gazali. (2018). Pesantren Di antara. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9.
- Eva Rosyida. (2019). Eva Rosyida, 2019. e-Modul Sosiologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2019.
- Fauzi. (2017). *Fauzi.pdf*.
- Firmansyah, Iman, M. (2019). Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 79–90.
- Giddens, A. (1991). *Anthony_Giddens.pdf*.
- Gunawan Adnan. (2020). Gunawan Adnan, Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020). 2020.
- Haboddin, M. (2012). Muhtar haboddin, (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal . *Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No. 1. 3(1)*, 2012.
- Hamali, S. (2017). Agama Dalam Perspektif Sosiologis. 12, 2017.
- Hamzah Ya'kub. (1993). *Hamzah.pdf*.
- Hemafitria. (2015). Hemafitria. (2015). Pembelajaran pkn sebagai pendidikan politik pemilih pemula . *Edukasi*, 13(2). 13, 2015.
- Imran, A. (2015). PERANAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT. *Hikmah*, 2(1), 23–39.

- Jasiman, R. D. (2012). Mempersiapkan Pejabat Politik yang Merakyat. 2012.
- Joko Santosa. (2019). Pendidikan Agama Islam. *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan*, 2(25), 64–88.
- Kuntowijoyo. (1991). *Kuntowi.pdf*.
- M. Rasyid Ridla. (2012). SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *AL-Ihkam*, 7(2), 294–304.
- Maloko, M. T. (2013). Etika Politik dalam Islam, dalam *Jurnal Al-Daulah*. 1(2), 2013.
- Mubasyaroh. (2018). Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam. 1(2), 2018.
- Muchith, M. S. (2012). Islam Dan Filosofi Auguste Comte.
- Munir Fuady. (2013). *munir fuady.pdf*.
- Mushfi, M. (2020). *Modernisasi Pendidikan*. 2507(February), 1–9.
- Nadir. (2019). *Membangun Pendidikan*. 3(1), 1–9.
- Nanang Martono. (2016a). *Nanang.pdf*.
- Nanang Martono. (2016b). *Sosiologi Perubahan Sosial*.
- Nurdin, M. F. (2017). Sosiologi Kontemporer: Filsafat Dan Orientasi. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/jsg.v2i1.15267>
- Nurrohman. (2011). Politik Islam dalam Cita dan Realita.
- Priyanto, E. (2021). Peningkatan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Tematik Melalui Supervisi Akademik. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v8i1.1077>
- Puspitasari, R. (2018). Revousi Perancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme Dan Demokrasi Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji Dan Dampaknya Di Dalam Dan

- Luar Negeri. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2–22.
- Qardhawi, Y. al. (2008). Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah. 2008.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *TAPIS*, 7(12), 1–30.
- Rosman, E. (2015). Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.
- Roswanto, A. (2015). Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles. In *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* (Vol. 15, Issue 2, pp. 123–138).
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Safa'at, M. (2002). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, John Rawls). November, 1–13.
- Sandra, L. J. (2013). Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur Dki Jakarta 2012 Di Media Sosial Twitter. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2).
- Saputra, H. E. R. (2019). PLURALISME AGAMA: STUDI TENTANG MAKNA DAN POLA KOMUNIKASI ANTAR UMAT ISLAM, HINDU DAN BUDHA DI PULAU LOMBOK. KOTA MATARAM. XI(1).
- Setyaningrum, A. (2005). Setyaningrum, Arie, (2005), Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas , (Mandatory, Journal Institute for Research and Empowerment (IRE), vol. 2, no. 2. 2(2), 2005.
- Soerjono Soekanto. (1999). *Soerjono Soekanto.pdf*
- Soerjono Soekanto. (2003). *soerjono.pdf*

- Sukardi, I. (2003). *Imam sukardi.pdf*.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Sulaiman, M. (2019). *Makna Agama*.
- Suwanto dan Rahmat Hidayat. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. 3(2), 2020.
- Syaid, M. N. (2019). Penyimpangan sosial dan pencegahannya.
- Syam, M. B. (2018). Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Aqidah-Ta UIN Alaudin Ujung Pandang*, IV(2), 198–213.
- Syarifuddin Jurdi. (2010). Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern. 2010.
- Taufik, M. (2018). Etika Plato dan Aristoteles: Dalam Perspektif Etika Islam. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(1), 27–45. <http://202.0.92.5/ushuluddin/ref/article/view/1855>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Utomo Harmantyo. (2021). Dekolonisasi Ilmu Sosial di Global Selatan; Kritik Southern Theory dan Epistemologies of the South terhadap Kanon Sosiologi Modern di Indonesia. 2021.
- Wahono, S. (2000). Satrio Wahono, Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi, (Bandung: Mizan & Serambi Ilmu Semesta, 2000). 2000.
- Wibisono, Y. (2020). *M. Yusuf.pdf*.
- Wiranata, R. S. (2016). *Tantangan Prospek dan peran pesantren*. 8(July), 1–23.

Yusak, Y. (2003). Yulius Yusak, (2003). Kemajemukan dan konflik Sosial. *Jurnal PsikoWacana* Vo. II No. 2, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 2, 2003.

Zakiah Darajat. (1982). *zakiah.pdf*

Zawawi, A. (2015). *Politik dalam Pandangan Islam*. 5(1), 2015.

POTENSI KONFLIK SOSIAL DI DALAM PEMILU



FAUZI ISMAIL

A. Pendahuluan

Di Negara yang menganut Demokrasi, pemilu merupakan sebuah keniscayaan karena pemilu telah dianggap sebagai indikator utama dari demokrasi, terserah bagaimana bentuk dan model pemilihannya yang pasti dalam sebuah Negara yang demokrasi rakyat mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam menentukan sikap mereka terhadap pemerintahan dan negaranya. Selain itu Pemilu sudah menjadi suatu yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu merupakan muara dari sistem demokrasi melalui sistem pemilihan umum rakyat untuk memilih wakilnya baik diparlemen maupun di pemerintahan. Di beberapa Negara, ada yang menyelenggarakan pemilu hanya untuk memilih

wakil rakyat untuk duduk di parlemen saja namun ada juga beberapa Negara yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih pemimpin tertinggi mereka di sebuah Negara.

Melihat begitu pentingnya sebuah pemilu, tentu dalam sudut pandang yang sederhana kita dapat mengetahui bahwa akan terdapat banyak sekali kepentingan yang bercampur aduk didalamnya. Persoalan pemilu tidak hanya sebatas bagaimana cara rakyat memilih perwakilannya, namun jauh lebih dalam lagi persoalan pemilu sangatlah kompleks, mulai dari pertarungan kelompok-kelompok berkepentingan, persoalan tenaga petugas pemilu, kampanye Partai Politik, money politik dan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya. Akibatnya, persoalan-persoalan ini akan sangat memungkinkan terjadinya konflik didalam masyarakat itu sendiri karena yang selama ini kita pahami bahwa konflik itu akan hadir dimanapun bahkan dalam skala yang sangat kecil pun konflik itu akan hadir apalagi dalam sebuah pemilihan umum, pastinya berbagai macam potensi konflik akan muncul di tangan-tengah masyarakat.

Beberapa literature yang penulis dapatkan, Konflik merupakan sebuah fenomena sosial yang wajar dan itu merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat bahkan dalam pandangan mark, konflik sosial akan timbul dan muncul seiring dengan berjalannya kehidupan bermasyarakat yang ada disekitar lingkungannya. Teori ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia atau masyarakat senantiasa

berkonflik. Dalam interaksi antar individu maupun antar kelompok dan individu maupun kelompok dan kelompok seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan interaksi, maupun tujuan interaksi (makmur, 2020). Tidak terkecuali dengan konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang politik, dan agama dan etnis yang berbeda.

Para ilmuwan sosiologi berpendapat bahwa sumber dari munculnya konflik adalah adanya hubungan sosial, politik, ekonomi di dalam masyarakat yang akarnya berasal dari perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang sangat terbatas jumlahnya dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly M, 2011). Adanya ketidakmerataan ini di dalam masyarakat maka terjadilah ketimpangan sosial, ketimpangan ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk memperebutkan pembagian sumber yang terbatas tadi, bagi pihak yang tidak mendapatkan sumber pasti akan berusaha untuk merebutnya, namun sebaliknya bagi pihak yang sudah menguasainya maka ia akan mempertahankan sumber yang sudah dimilikinya.

Dalam sudut pandang sosiologis, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian dan komponen, yang masing-masing memiliki serangkaian kepentingannya sendiri, dengan satu komponen berusaha untuk mendominasi kepentingan yang lain untuk memajukan tujuan atau keuntungan mereka sendiri. Yang paling penting.

Menurut teori konflik sosial, entitas sosial memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berlawanan. Disparitas sudut pandang dan kepentingan ini menimbulkan konflik sosial, yang antara lain mengakibatkan tindakan saling mengalahkan, merusak, dan menghancurkan (Dany Haryanto, 2011).

Dampak yang dihasilkan tidak selalu negative karena karena kalau kita kaji lebih dalam lagi Ada dua dampak yang dihasilkan oleh konflik, pertama adalah dampak yang bersifat positif dan yang kedua adalah dampak yang bersifat negative. Dampak positif dari sebuah konflik adalah adanya pendinamisasikan dan pendewasaan masyarakat dalam berpolitik, karena sebagai manusia tentunya kita akan selalu belajar dari pengalaman dan konflik memberikan pengalaman kepada kita, dan tentunya ini merupakan hal yang wajar terjadi. Demokrasi tanpa konflik ibaratnya seperti suatu proses membuat makanan tanpa garam, akan hambar rasanya (Tualeka, 2017).

Konflik dapat digambarkan secara sosiologis sebagai proses sosial antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak berusaha untuk melenyapkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Konflik dapat dipicu oleh perbedaan yang dibawa setiap orang ke dalam percakapan. Kualitas fisik, pengetahuan, kebiasaan, dan faktor lain semuanya dapat berkontribusi pada varians ini. dalam kasus kemajemukan yang ada di Indonesia,

dengan meminjam definisi konflik tadi maka tentu saja potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia sangatlah besar. Melihat begitu kompleksnya persoalan didalam pemilu dan sedikit kajian tentang konflik sosial Maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana potensi konflik di Negara yang sangat majemuk ini (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Berdasarkan penjelasan sederhana tentang konflik diatas, maka sangatlah pantas jika kita mengatakan bahwa potensi konflik itu juga hadir di dalam pemilihan umum. Konflik yang terjadi pada pemilu bisa dikatakan sebagai konflik politik, karena pada umumnya konflik pada pemilu ini disebabkan oleh adanya perpedaan kepentingan di dalam politik, walaupun sebenarnya potensi konflik lain juga besar kemungkinannya terjadi di dalam masyarakat karena adanya pemilu.

B. Pemilu dan konflik sosial

Penjelasan diatas mengantarkan kita kepada sebuah kesimpulan bahwa konflik itu hadir dimana-mana, bahkan dalam kondisi apapun konflik itu akan selalau ada, lantas bagaimana dengan kondisi ketika masyarakat melakukan pesta demokrasi memilih wakil mereka dan pemimpin lewat pemilu apakah konflik itu berpotensi muncul? Tentu potensi itu akan selalu ada.

Pemilu dan politik diibaratkan seperti dua sisi mata uang dimana satu dan lainnya saling terisi oleh karena itu Pertentangan-pertentangan politik yang terjadi pada pemilu juga bisa menjadi sumber dari konflik, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, dia membagikan konflik itu kedalam lima bentuk yaitu:

1. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu
2. Konflik rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan rasial
3. Konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial
4. Konflik politik, yaitu konflik yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan tujuan politis dari seseorang atau kelompok
5. Konflik internasional, yaitu konflik yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh terhadap kedaulatan sebuah Negara (Soerjono Soekanto, 1999).

Potensi konflik sosial di pemilu sangatlah besar, hal ini berkaca pada penjelasan yang sudah dibahas sekilas diatas tadi, perbedaan-perbedaan pasti akan muncul Ketika pemilu, baik itu perbedaan sikap dalam memilih maupun perbedaan sudut pandang masyarakat dalam mendukung salah satu

calon. Perbedaan-perbedaan ini sangat rentan terhadap munculnya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terlebih lagi masyarakat Indonesia yang sifatnya sangat majemuk, perbedaan-perbedaan dalam struktur masyarakat sudah terlihat dari bawaan lahir seperti ras, suku, lainnya. Apalagi kalau bertambah dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi didalam pemilu.

C. Indonesia dengan kemajemukannya

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan budayanya, berbagai macam suku bangsa hadir didalamnya dan juga terdapat beberapa agama yang dianut oleh rakyatnya. Kemajemukan yang ada pada Indonesia menjadi kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa ini. Namun kemajemukan yang ada di Indonesia ini berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat jika tidak bisa dikelola dengan baik. Realita di lapangan yang kita lihat tidak jarang terjadi bentrokan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain hanya karena adanya perbedaan antara mereka.

Secara teoritis kemajemukan itu ada dua, pertama adalah kemajemukan yang bersifat horizontal dan yang kedua kemajemukan vertical. Kemajemukan horizontal adalah kemajemukan struktur masyarakat yang di bawa secara kultural, seperti perbedaan suku bangsa, ras, agama maupun majemuk secara sosial yang disebabkan oleh perbedaan

pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh pengusaha, pegawai dan militer dan lain-lain. Kemajemukan horizontal ini juga bisa menyebabkan konflik karena masing-masing unsur kultural dalam masyarakat ini mempunyai karakteristik tersendiri dan masing-masing pengamal budaya tersebut ingin mempertahankan eksistensi budayanya masing-masing. Didalam masyarakat seperti ini, jika belum ada konsensus atau kesepakatan nilai menjadi pegangan bersama, maka konflik yang terjadi bisa memicu perang saudara (Elly M, 2011).

Sedangkan kemajemukan vertical adalah kema-jemukan dalam struktur masyarakat yang disebabkan oleh terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan ini juga bisa menimbulkan konflik sosial karena ada perbedaan didalam masyarakat, dimana ada sekelompok kecil masyarakat memiliki kekayaan dan kehidupan yang mapan serta akses kekuasaan yang besar, namun sebagian lagi banyak masyarakat justru berbeda dengan kelompok pertama tadi. Adanya perbedaan antara dua kelompok ini terhadap pendidikan, kekayaan dan akses kekuasaan menyebabkan potensi konflik sosial bisa saja tumbuh subur di dalamnya (Elly M, 2011).

Mayasrakat majemuk terdiri dari dua aneka kelompok. Kelompok-kelompok ini membedakan diri dengan kelompok lainnya berdadsarkan perbedaan etnsitas, kelompok-kelompok ini dapat difenisikan kedalam dua definisi, pertama etnisitas sebagai suatu kelompok harus ada sejumlah individu yang

dapat dikenal, biasanya secara sosial berinteraksi dan melestarikan sendiri dari waktu ke waktu. Kedua, kelompok ini butuh etnik dalam karakter. Majemuk adalah istilah yang di utarakan pertama kali oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa hindia belanda. Menurut Furnivall masyarakat Indonesia merupakan majemuk, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam kesatuan politik. Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah dari antara satu dengan lainnya oleh karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis (Yusak, 2003).

Berkaca pada penjelasan diatas, kemajemukan yang ada di Indonesia tidak hanya sebatas kemajemukan horizontal saja ataupun hanya kemajemukan vertical saja. Namun kedua pembagian kemajemukan ini terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kemajemukan berlatar belakang kultural sudah menadi sebuah keniscayaan dan juga kemajemukan secara polarisasi status sosial juga sangat banyak bisa kita temukan. Melihat realita ini maka tentunya potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia sangatlah besar.

D. Politik Identitas Sumber Konflik Di Pemilu

Tentu penulis tidak bisa menjawabnya secara langsung, sulit untuk mengatakan bahwa konflik pemilu dikarenakan politik identitas, seperti yang kita pahami bersama bahwa pemilu merupakan sebuah sarana yang didesain sedemikian rupa untuk melahirkan calon perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah. Namun dari beberapa literature dan juga sedikit penjelasan tentang konflik diatas yang mana konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan antar individu, maka dari itu penulis ingin menyimpulkan bahwa politik identitas juga bisa menjadi sumber konflik potensial didalam pemilu.

Politik identitas muncul dari asumsi bahwa ide perbedaan (pluralisme) lebih menjanjikan kebebasan, toleransi meskipun ide ini memiliki konsekuensi seperti kekerasan (*violence*), pola intoleransi, pertentangan etnis. Politik identitas kemudian dianggap sebagai respon terhadap kegagalan modernitas memenuhi janjinya yaitu kualitas hidup manusia dan klaim kebebasan manusia.

Identitas ini sekarang bisa menjadi suatu hal positif bila mana identitas ini di kelola dengan benar, namun tidak jarang pula identitas ini menjadi sebuah alat yang bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Kemajemukan yang ada di Indonesia ini akan sangat potensial dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk dijadikan sebagai komoditas politik atas nama kepentingan sesaat.

Antony Giddens dalam bukunya *modernity and Self Identity* mengatakan bahwa identitas diri dipahami dengan kemampuan untuk menarasikan tentang diri sendiri, dengan demikian menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas perjalanan hidupnya. Seseorang berusaha mengkonstruksi identitas yang saling bertalian di mana diri membentuk lintasan perkembangan dari pengalaman masa lalu menuju masa depan. Dengan kata lain, identitas adalah refleksi seseorang atau sebuah komunitas terhadap diri mereka sendiri dan dikonstruksikan sesuai dengan kebutuhan dari komunitas tersebut. Konstruksi dari identitas ini tentunya menggunakan identifikasi perbedaan dan persamaan antar individu maupun kelompok, hal ini untuk menegaskan identitas itu sendiri, misalnya budaya, etnis, agama gender. Identitas kemudian menjadi landasan utama tindakan-tindakan yang defensivedan *offensive* terhadap identitas itu sendiri, sehingga kemudian membatasi seseorang atau komunitas dengan yang lainnya (Giddens, 1991).

Sedangkan Menurut Lukmantoro (2008:2) Politik identitas merupakan sebuah tindakan politis yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan atau kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada etnis, ras, gender, atau keagamaan.

Dalam kajian Ilmu sosial, politik identitas terbagi kedalam dua katagori yakni identitas sosial dan identitas politik.

Identitas sosial merupakan identitas yang di dasarkan oleh keadaan sosial seseorang, seperti ras, kelas sosial, seksualitas dan gender. Sedangkan identitas politik adalah identitas yang didasarkan oleh pemberian terhadap status seseorang seperti kewarganeraan dan nasionalitasnya. Per-bedaan antara dua katagori ini terletak pada posisi untuk menentukan subjek, dalam identitas sosial maka subjek ditentukan oleh relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan dalam identitas politik posisi subjek di suatu komunitas ditentukan oleh suatu rasa kepemilikan dan sekaligus menandai posisi subjek yang lainya dalam sesuatu pembedaan (Setyaningrum, 2005).

Sementara itu dalam kajian ilmu politik, pengkatagorian politik identitas juga terbagi kedalam dua katagori yaitu identitas politik dan politik identitas, perbedaan antara kedaunya lebih tajam lagi di bandingkan dengan pembedaan dalam kajian ilmu sosial. Dalam kajian ilmu politik, identitas politik di maknai sebagai suatu kontruksi sosial yang akan menentukan posisi kepentingan dari sebuah subjek dalam suatu komunitas politik. Sedangkan politik identitas merupakan sebuah tindakan yang mengacu kepada mekanisme politik untuk mengorganisasikan identitas sebagai sumber dan sarana politik (Haboddin, 2012). Sekarang ini Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sarana dan sumber politik dalam pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan politik kian sering kita temukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu para ilmuwan politik yang bergelut

dalam wacana politik identitas berusaha keras untuk mencoba menafsirkan kembali politik identitas kedalam logika yang lebih sederhana lagi dan lebih operasional lagi.

Dalam konteks pemilu Indonesia, kita sudah melihat banyak contoh bahwa politik identitas ini selalu hadir di dalamnya dan tidak jarang juga kita melihat bahwa politik identitas ini menjadi pemicu konflik di dalam masyarakat pada saat pemilu. Sebagai Negara yang majemuk, munculnya politik identitas adalah sebuah kewajaran, namun ketika politik identitas ini sudah melampaui dosisnya dalam artian para kandidat sering mengeksplorasi identitas secara berlebihan maka potensi untuk munculnya konflik sangatlah besar.

Di Negara majemuk seperti Indonesia ini sudah selayaknya bagi semua kandidat untuk tidak membawa-bawa identitas sebagai komoditas politik yang hanya bersifat sementara itu, ada baiknya para kandidat sekarang menjual program yang bagus kepada masyarakat serta mengajak para pemilih untuk tidak lagi melihat seorang kandidat hanya dari latar belakang identitasnya saja. Membawa-bawa identitas didalam pemilu untuk kepentingan semata hanya akan menimbulkan konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

E. Tingkat Literasi Masyarakat

Faktor selanjutnya menurut penulis adalah rendahnya literasi masyarakat, tingkat literasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kematangan rakyat dalam menghadapi perbedaan. Seperti yang kita pahami, sebagai bangsa yang majemuk pasti akan sangat banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan itu bisa saja akan menimbulkan konflik jika masyarakat tidak bisa menanggapi perbedaan itu dengan bijak. Berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat, dalam beberapa literature dan kasus terlihat jelas bahwa di masyarakat yang mempunyai tingkat literasi yang tinggi maka konflik cenderung rendah karena masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perbedaan.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli. Semisal Dorcey yang mengatakan Bahwa Kondisi yang memicu timbulnya konflik menurut dia adalah; perbedaan pemahaman dan pengetahuan, perbedaan kepentingan, perbedaan nilai, dan persoalan pribadi atau historis (Haboddin, 2012). Sedangkan menurut (Soetrisno, 2003), penyebab konflik ada 3 yakni:

1. Hubungan negara dengan masyarakat masih belum ada format jelas (negara dominasi)
2. Mengurangnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
3. Lajunya penetrasi kapital di wilayah pedesaan sehingga masyarakat kehilangan control SDA kawasan mereka.

Dorcey dalam pandangannya mengatakan bahwa perbedaan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat akan menjadi pemicu untuk munculnya konflik. Dalam konteks pemilu, perbedaan dukung mendukung itu adalah sebuah keniscayaan dan tentu saja perbedaan ini akan sangat mungkin menyebabkan timbulnya konflik, terlebih lagi jika salah calon yang didukung mengalami kekalahan. Tidak jarang kita melihat terjadinya perseteruan antar calon dan pendukung hanya karena mereka berbeda sikap antara satu dengan yang lainnya.

Namun potensi konflik semacam ini relative bisa dihindari bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan atau literasi yang baik. Bagi mereka pemilu adalah ajang untuk memilih bukan untuk bermusuhan, jika memang calon yang didukungnya kalah tentunya kita harus bisa menerima dengan lapang dada.

Sudah sepantasnya para pelaku politik di negara ini memberikan literasi yang baik kepada masyarakat agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari, para pelaku politik harus sadar bahwa mereka itu menjadi patroen dalam masyarakat, masyarakat sebagai klien pasti akan mencontohkan dan melaukan apa yang disampaikan oleh seorang patroen. Jika para pelaku politik menyampaikan hal-hal yang baik dan bisa mencontohkannya tentu para pendukungnya juga akan mengikutinya dan secara tidak langsung setidaknya potensi konflik bisa dihindari.

F. Pentingnya Pendidikan Politik

Konflik adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari, bahkan konflik itu merupakan bagian dari kehidupan manusia, namun konflik itu bisa saja menjadi buruk tak kala konflik berubah menjadi kekerasan dan perpecahan di dalam masyarakat, untuk itu rasanya perlu ada solusi bahwa potensi konflik sekecil apapun itu bisa dikelola dengan tujuan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Banyaknya kasus konflik pemilu yang terjadi di setiap pemilu di Indonesia menandakan masih kurangnya pendidikan politik di masyarakat kita. Pendidikan politik yang baik tentu sangat diharapkan akan mencegah potensi konflik menjadi konflik actual di masyarakat, pendidikan politik menjadi tugas bersama walaupun di dalam undang-undang Negara kita mengamanatkan pendidikan politik diberikan oleh partai politik, keberadaan partai politik di Indonesia ini merupakan konsekuensi dari demokrasi perwakilan yang kita pakai.

Sebelumnya pada masa orde baru, Pendidikan politik dibenankan kepada pemerintah, baru pada masa reformasi pendidikan politik dibenankan kepada Partai Politik. Secara normative pendidikan politik oleh parpol terdapat dalam UU partai politik sejak era reformasi melalui UU no 3 tahun 1990 dan UU Nomor 31 tahun 2002 dan UU Nomor 2 tahun 2008.

Pendidikan politik harus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian

bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepakatan bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran berbangsa, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti dan keikhlasan untuk mengorbankan kepentingan bangsa.

Urgensi pendidikan politik juga didasarkan pada asumsi kedaulatan rakyat yang mempunyai makna bahwa pemerintahan yang adil adalah siapa yang mempunyai kekuasaan pemerintahan maka dia bertanggung jawab terhadapnya. Hal ini berarti bahwa kesadaran politik rakyat itu mutlak harus terpenhi, karena jika rakyat tidak memiliki kesadaran dan pemahaman politik maka rasa tanggung jawabnya sangatlah kurang. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat sama-sama mempunyai kepentingan akan adanya kesadaran politik bagi masyarakat. Pendidikan politik harus datang dari kedua belah pihak (Hemafitria, 2015).

Pemahaman literasi dan pendidikan politik yang baik sangat diharapkan bisa membuat rakyat menjadi semakin dewasa dalam menghadapi perbedaan, karena sesuai yang dikatakan oleh Dorsey bahwa konflik itu bisa muncul karena adanya kesenjangan pengetahuan dalam masyarakat terutama pengetahuan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat bisa didapatkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti Partai politik atau lembaga-lembaga edukasi lainnya.

Dalam undang-undang pendidikan politik didefinisikan sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen ini lebih dipertegas dalam Bab ke VIII Pasal 31 dengan menyatakan, bahwa:

1. Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne-gara; dan c) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Namun partai politik bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab terhdap pendidikan politik masayrakat, menurut Duverger, terdapat beberapa lembaga yang dapat difungsikan sebagai wadah pendidikan bagi masyarakat sehingga hal demikian mampu menciptakan situasi dan

kondisi yang tenteram khususnya ruang sosiologi masyarakat dalam memandang konsep perpolitikan seperti lembaga kepemudaan dan lembaga kebudayaan. Minimnya pendidikan politik menjadi pemicu mendasar dari lahirnya konflik dan masalah-masalah baik dalam kontestasi pemilu (Nadir, 2019).

G. Penutup

Kesimpulan

Konflik akan selalu hadir di dalam kehidupan masyarakat, konflik itu tidak bisa dihindari namun konflik itu bisa dikelola. Sebagai Negara majemuk yang diisi oleh berbagai etnis bangsa didalamnya, potensi konflik di Indonesia cukuplah besar. Potensi konflik ini semakin besar terjadi ketika bangsa ini melakukan pesta rakyat yaitu pemilu setiap lima tahun sekali, pemilu dilakukan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat dalam memilih perwakilan mereka di legislative maupun di eksekutif.

Politik identitas menjadi faktor utama yang berpotensi menjadi konflik di dalam pemilu, sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa perbedaan identitas seringkali menjadi bahan jualan bagi para calon dalam setiap pemilu demi kepentingan sesaat mereka tanpa mereka sadari bahwa hal yang mereka lakukan itu sangatlah berbahaya. Oleh karenanya untuk membendung potensi konflik tersebut maka sangat dibutuhkan literasi yang baik bagi masyarakat Indonesia,

literasi itu bisa berupa pendidikan politik, peningkatan pendidikan masyarakat dan lain sebagainya. Dengan adanya pendidikan politik yang baik diharapkan masyarakat kita semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dany Haryanto, S. .. dan G. Edwi Nugroho. 2011. "Dany Haryanto, S.S Dan G. Edwi Nugroho, (2011). Pengantar Sosiologi Dasar , (Jakarta: PT. Prestas Pustakarya." 2011.
- Elly M. 2011. "Pengantar Sosiologi."
- Giddens, Anthony. 1991. "Anthony_Giddens.Pdf."
- Haboddin, Muhtar. 2012. "Muhtar Haboddin, (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal . Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No. 1." 3(1):2012.
- Hemafitria. 2015. "Hemafitria. (2015). Pembelajaran Pkn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula . Edukasi, 13(2)." 13:2015.
- Nadir. 2019. "Membangun Pendidikan." 3(1):1-9.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M. Fadhil Nurdin. 2018. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2(2):38-48.
- Setyaningrum, Arie. 2005. "Setyaningrum, Arie, (2005), Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas , (Mandatory, Journal Institute for Research and Empowerment (IRE), Vol. 2, No. 2." 2(2):2005.
- Soerjono Soekanto. 1999. "Soerjono Soekanto.Pdf."
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 3(1):32-48.
- Yusak, Yulius. 2003. "Yulius Yusak, (2003). Kemajemukan Dan Konflik Sosial. Jurnal PsikoWacana Vo. II No. 2, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga."

Brief Curriculum Vitae



N a m a : DR. Drs. H. Gunawan Adnan, M.A. Ph.D

Tempat /Tgl.Lahir : Tiba Mesjid (Beureunuen) / 16.12.1968

Pekerjaan : - Dosen, Sosiolog & Peneliti Senior pada UIN Ar-Raniry.

- Konsultan Bidang Community Development,
- Pendidikan, Agama, Filsafat, Gender, dan Sosial
- Kemasyarakatan (Ilmu-ilmu Humaniora).

Pangkat / Golongan : Lektor Kepala / IV/a sejak 2009 (on going Process for obtaining Professorship)

Jabatan : Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry.

Keluarga:

Istri : Linda Andrianti

Anak :
1. Habiburrahman
2. Habiburrahim
3. Habiburrasyid

Alamat :

Residence : Jl. Tanggul NO. 26 Desa Peunyerat
Kecamatan Banda Raya – Banda Aceh 23116 Prov.
Aceh - Indonesia

Kantor : UIN Ar-Raniry

Jl. Ar-Raniry No.1 Darussalam 23111 – Banda Aceh
Prop. NAD – Indonesia

Tel./ Fax. : 0651-7552921/7552922

E-Mail/Web. Kantor : UIN@ar-raniry.ac.id /

www.ar-raniry.ac.id

Mobile (HP)/WA : 0812 6916 555

E-Mail: gunawanadnan@ar-raniry.ac.id
gunawanadnan.arraniry@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1999 – 2004 : Program Doktor (Strata 3) Bidang Filsafat (Philosophical Doctor/Ph.D) pada Fakultas Filsafat dan Program Doktor dalam Bidang Sociology (DR by Courses) pada Fakultas Ethnology, Universitas Georgia Augusta, Goettingen – Germany.

Disertasi Doctor : *“Women and The Glorious Qur’an: An Analytical Study on Women-Related Verses of Surah An-Nisa’ ”* (Wanita & Kitab Suci Al-Qur’an: Suatu Study Analitis thd Ayat-ayat tentang issue Wanita dalam Surah An-Nisa). Lulus dengan Predikat **“Summa Cumlaude”**.

Januari – Des. 2000 : Fellow-student pada Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir

1994 – 1996 : Program Master (S2/ M.A.) bidang Anthropology-Sociology pada Universitas Leiden, The Netherlands (Belanda).

Thesis Master : *“Sha’ir Negeri Makkah dan Madinah: An Account of Pilgrimage from a Malay World”*. (Sha’ir Negeri Makkah & Madinah: Suatu Catatan tentang Haji dari Dunia Melayu). Lulus dengan predikat **“Magna Cumlaude”**.

1987 – 1991 : Program Strata-1 (S1/Drs.) pada Fakultas Tarbiyah (Ilmu Kependidikan) UIN Ar-Raniry, Jurusan Bahasa Arab.

Skripsi S-1 : *“Al-Bahtsu ‘an al-Ma’ānī fī Sūrah al-Rahmān”* (Kajian tentang Ilmu Ma’any dalam Surah Al-Rahman). Lulus dengan Predikat **“Summa Cumlaude”**.

- 1984 – 1987 : M A N - I Banda Aceh
 1981 – 1984 : M Ts N Beureunuen
 1976 – 1981 : M I N Beureunuen

Jabatan yang pernah diemban, diantaranya, ialah :

- 2021 – Sekarang : Dewan Pakar ICMI Provinsi Aceh
 2021 - Sekarang : Dewan Penasehat dan Pembina PERGUNU
 Prov. Aceh
 2021 – Sekarang : Ketua Team Pembinaan & Pengawasan MoU
 Helsinki
 2018 – Sekarang : Wakil Rektor I UIN Arraniry Banda Aceh
 2016 – 2020 : Tenaga Ahli DPRA
 2016 – Sekarang : Anggota Wasit Muaythai (Thay-Boxing) Na-
 sional
 2014 – Sekarang : Ketua Umum IPIM (Ikatan Persaudaraan
 Imam Mesjid) Provinsi Aceh.
 2014 – Sekarang : Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar
 Negeri IPIM Indonesia Pusat.
 2013 – Sekarang : Assessor BAN-PT (Badan Akreditasi Nasion-
 al-Perguruan Tinggi) Kementerian Ristek
 dan Pendidikan Tinggi R I.
 2013 – 2018 : Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar
 Negeri KONI Aceh.
 2013 – 2016 : Senior Manager for External Relation Affairs
 (Kepala Humas) pada PT. MIFA Bersaudara
 dan PT. BEL (Perusahaan Tambang Batubara
 di Meulaboh & Nagan Raya)
 2014 – 2020 : Waket. Litbang Majelis Pendidikan Daerah
 (MPD) Provinsi Aceh
 Jan. – Juli 2013 : Visiting Professor pada University of Sydney
 – Australia

- 2012 – Sekarang : Ketua Litbang Penguru Besar (PB) PORLASI Pusat.
- July – Dec. 2011 : Visiting Professor pada University of The Philippines (UPI-Diliman) Manila.
- 2010 – Sekarang : Imam Besar Mesjid Nurul Huda Banda Aceh.
- 2010 – Sekarang : Sekjend PORLASI (Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia) Prov. Aceh.
- 2008 – 2010 : Senior Manager & Program Coordinator pada International Institute for Aceh Peace (IIAP), sebuah Institusi yang bergerak dalam penguatan perdamaian Aceh di bawah komando Mr. Marti Atihsari (mantan Presiden Finlandia)
- 2010 – Sekarang : Presidium KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Aceh.
- 2009 – 2013 : Ketua Harian KODRAT (Keluarga Olahraga Tarung Drajat) Provinsi Aceh.
- 2009 – Sekarang : Ketua Dewan Inter-Religious Dialogue (Dialog Antar Agama) Prov. Aceh.
- 2009 – Sekarang : Ketua Team Expert Pengembangan Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry.
- 2008 – 2011 : Early Childhood Development Consultant pada UNICEF Kantor site Prov. Aceh.
- 2006 – Sekarang : Koordinator Environment Parliament Watch (EPW) Prov. Aceh.
- 2006 – 2008 : Trainer ESQ bersama bapak Ary Ginanjar dkk.
- 2012 – 2017 : Pengurus Harian KONI Prov. Aceh Periode 2012-2017
- 2006 – 2011 : Pengurus Harian KONI PROV.Aceh Periode 2006-2010.
- 2006 – 2010 : Pengurus BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia) Prov. Aceh.

- 2006 – 2008 : Direktur Pengembangan Pengajaran Agama BRR NAD-Nias (Deputy Agama, Budaya & Kesejahteraan Sosial).
- 2005 – Sekarang : Humas PAJ (Persatuan Alumni Jerman) Prov. Aceh
- 2005 – 2006 : Direktur Bid. Pendidikan Agama BRR NAD-Nias (Deputy Pendidikan & Kesehatan).
- 2004 – 2005 : Ketua Lembaga Pusat Penelitian (PUSLIT) IAIN Ar-Raniry.
- 2002 – 2003 : Quality Control Staff pada PT. Bosch Goettingen-Germany.
- 2000 – 2004 : KUA&Imam KJRI Frankfurt, KBRI Belanda & Belgia
- 1999 – 2004 : Humas ACHSO (Aceh Solidarity in Europe) Germany
- 1999 – 2004 : Pengurus PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di Jerman
- 1998 – 1990 : Sekjend. BPKM (BEM) IAIN Ar-Raniry
- 1988 - 1990 : Ketua Bid. Perkaderan dan Ummat HMI Cab. B. Aceh.
- 1987 - 1988 : Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah.
- 1984 – 1987 : Pengurus PW PII Prop.D.I. Aceh
- 1983 – 1984 : Pengurus PII (Pelajar Islam Indonesia) Kab. Pidie.

Training-training / Kursus yang pernah diikuti, diantaranya, ialah :

- August 2015 : Intensive Course on Quality Assurance, held by Indonesian Coal Mining Association in Jakarta
- Nov. - Dec. 2005 : Psycho-Social Workshop for Disaster Mitigation yang diadakan oleh IIPD (International

Institute for Psycho-social Development), Virginia – USA.

October 2005 : ESQ (Emotional & Spiritual Quotient) Training untuk kelas Executive di JCC Jakarta.

August-Sept. 2004 : ToT (Training of Trainer) CBC, Management & Leadership di Hotel Sriwedari, Jogjakarta.

October 2003 : Short Course on Community Development pada Univ. of Heidelberg, Germany.

April – June 2003 : Workshop tentang Poverty Alleviation (pengentasan kemiskinan) di Vrij Universitaet, Amsterdam–Belanda.

August – October 2002: Workshop tentang Conflict Resolution pada The Faculty of Politics and Social Studies, Universitas Frankfurt, Jerman.

June – August 2002 : Social Justice and Welfare Workshop at The University of Leipzig – Germany.

June – August 1995 : Training Management & Leadership di Universitas Sorbone, Perancis.

January – Dec. 1992 : Pre-Departure Training for Study Abroad & Cross Culture Understanding di Wisma Sejahtera IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

January – Maret 1993 : Training Pra-jabatan Nasional, PUSDIKLAT Depag. RI, Ciputat, Jakarta Selatan.

1984 – 1987 : Training Da'wah di ISKADA, Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

1983 – 1986 : Training-training Ke-PII-an (Mapram, Basic, Mental Training, Instructure, etc.)

Negara-negara yang pernah dikunjungi :

- Amerika Serikat, Canada, Belanda, Jerman, Austria, Belgia, Inggris, Luxemburg, Swiss, Prancis, Polandia, Bulgaria,

Lithuania, Chechoslowakia (Praha), Italia, Spanyol, Denmark, Norwegia, Swedia, Turki, Tunisia, Maroko, Mesir, Jordania, Abu Dhabi (UEA), Saudi Arabia, Yaman, Australia, China, Hongkong, India, Thailand, Philipina, Jepang, Singapore, Malaysia, dll.

Prestasi / Penghargaan yang Pernah Diraih:

- Qari Terbaik Kanak-Kanak Tk. Provinsi pada MTQ Prov. Aceh thn.1980.
- Juara Cerdas-Cermat P4 tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Pidie di Sigli, tahun 1979.
- Juara Cerdas-Cermat P4 tingkat Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Pidie di Sigli, tahun 1982.
- Juara I Cerdas Cermat Isi & Kandungan Al-Qur'an pada MTQ tingkat Kabupaten Pidie, tahun 1982 di Jabal Ghafur, Pidie-Sigli.
- Juara III Cerdas Cermat Isi & Kandungan Al-Qur'an pada MTQ tingkat Provinsi Aceh di Blangpidie, tahun 1982.
- Juara I Cerdas-Cermat Isi dan Kandungan Al-Qur'an pada MTQ tingkat Provinsi di Langsa, tahun 1984.
- Juara III Cerdas-Cermat Isi dan Kandungan Al-Qur'an pada MTQ Tingkat Nasional di Pontianak, tahun 1985.
- Lulusan terbaik (Mahasiswa Teladan) IAIN Ar-Raniry tahun 1991.
- Lulusan Terbaik Peserta Kursus Bahasa Jerman pada Goethe-Institute Goettingen-Germany tahun 1999.
- Juara I Kejuaraan Taekwondo antar Mahasiswa Fakultas Ethnology, Universitas Georgia Augusta-Germany tahun 2000.
- Juara I Tennis Meja antar Mahasiswa Indonesia se-Goettingen tahun 2001
- Juara I Lomba Karaoke Ultah Kemerdekaan RI ke 50 yang diadakan oleh KBRI Belanda di Den Haag-Belanda, tahun 1995.

- Dan lain-lain.

Karya-karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan, diantaranya, ialah :

- "Pendidikan Multikultur: suatu keniscayaan di negara multi ras, etnik dan agama seperti Indonesia", Journal Pendidikan Majlis Pendidikan Aceh (MPD), 2012.
- "*Religion and Poverty*" (*Agama dan Kemiskinan*), sebuah paper yang dipresentasikan dalam seminar Internasional dengan thema "*Anthropology and The Poverty Alleviation*" di Kunming, China, tahun 2008.
- "*Women and The Glorious Qur'an: An Analytical Study on Women-Related Verses of Surah An-Nisa'*". Disertasi doctor (tahun 2003) yang sudah dijadikan buku dan dipublikasikan di Jerman & Eropa Barat serta dapat dipesan via Internet (online).
- "*Muslim Scholars and Their Role in Developing Natural Sciences*". Sebuah paper yang dipresentasikan dalam seminar tentang "*Islam and Science*", di Universitas Heidelberg, Jerman, August 2001.
- "*The True Nature of Tauhid and Its Relation to The Problem of The Muslim in The World*", Sebuah artikel dimuat di Jurnal Ilmu Filsafat, *At-Tafkir*, Vol. 4 tahun 2007. Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta.
- "*Peaceful Co-Existence and Social Stability*", sebuah artikel dimuat dalam journal of social sciences, Vol. X. Hamburg, 2002.
- "*Gott ist immer da*", sebuah artikel dimuat oleh majalah anak-anak Islami, Hamburg-Jerman, 2001
- "*Women in the Stage of History*", suatu artikel yang dimuat dalam journal Gender Mainstreaming, University of California, USA.

- *“Pendidikan: Modal Utama Pembangunan sebuah Bangsa”*, Paper dipresentasikan dalam Forum Seminar Pendidikan Nasional di UIN Jakarta, April 1998.
- *“Pluralisme adalah Sunnatullah”*, Artikel yang dimuat di Journal Philosophia, Vol. V. P3B. Surabaya, 1998.
- *“Islam & Solidaritas Sosial (Philantrophy)”*, paper disampaikan pada seminar tentang zakat & pemberdayaan ummat. P2M Jakarta, 1997.
- *“Al-Qur’an: Lautan Ilmu yang tidak berhujung”*, buku saku yang dipersembahkan sebagai kenang-kenangan buat jama’ah muslimin Indonesia di Jerman, 2003.
- *“Islam & Ke-Indonesiaan”*, sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal humaniora, Semarang, 2001
- *“Sha’ir Negeri Makkah dan Madinah: An Account of Pilgrimage from a Malay World”*. Thesis S2 tahun 1996, Universitas Leiden (Belanda) tidak dipublikasikan.
- *“Al-Bahtsu ‘an al-Ma’ānī fī Sūrah al-Rahmān”*, Skripsi S-1, 1991, untuk mendapatkan gelar Doktorandus (Drs.) dalam Ilmu Pendidikan dan Bhs. Arab pada Fakultas Tarbiyah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- *Dan lain-lain.*

Kecakapan Berbahasa (Language Proficiency)

- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Bahasa Belanda
- Bahasa Jerman
- Bahasa Perancis (pasif)
- Bahasa Turki dan Persia (pasif)

Karya Tulis:

A. Jurnal Ilmiah

Judul Jurnal	Penerbit	Tahun
Women and the Glorious Qur' ān: An Analytical Study of Women Related Verses of Sūra An-Nisa'	Universitätsverlag Göttingen	2004
Ethics in Islamic economics: microfoundations for an ethical endogeneity	International Journal of Ethics and Systems	2020
Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia	Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 8 (1)	2020
Impacts of inquiry learning model on students' cognitive and critical thinking ability	Cypriot Journal of Educational Sciences 16 (3)	2021
Gender mainstreaming in the context of Aceh development	Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16 (2)	2017
Islamic and Customary Law in Aceh Darussalam Constitution	Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and ...	2013
Mendefinisikan Ulang Pluralisme Agama sebagai Sebuah Tantangan Global	Refleksi 13 (1)	2013
Women and The Glorious Qur'an	Analytical Study of Women-Related Verses of	2004

Judul Jurnal	Penerbit	Tahun
	Sura An-Nisa', Göttingen	
Pemberdayaan Gender, Pendapatan Perempuan Dan Penurunan Kemiskinan: Bukti Data Panel Dari Kawasan Barat Indonesia	Media Ekonomi 28 (1)	2021
The Role Of Multimedia In Islamic Teaching Propagation (Da'wah): An Indonesian Experience	Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah 25 (2)	2020
Digital Trail Awareness in Islamic Perspective	Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology 7 (2)	2022
Do gender empowerment and democracy reduce poverty rate? A cross-provinces evidence from western indonesia	Economics & Sociology 14 (3)	2021
The Problems and Alternative Solutions for the Implementation of Entrepreneurship Education in the Higher Education: A Literature Review	Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah 5 (2)	2020
Hakikat Pendidikan Islami	At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam	2017
The Realism Of Aesthetics As The Nearest Image Of God: A Liberated Ideology in the Islamic Aesthetics	Jurnal Ushuluddin 24 (2)	2016
The Leadership Of Women In Islamic	Yinyang: Jurnal	2013

Judul Jurnal	Penerbit	Tahun
Societies:(Past And Present)	Studi Islam Gender dan Anak 8 (1)	
Internat Dalam Perspektif Nasionalis Dan Prospeknya Di Aceh: Kajian Eksploratif Pemikiran Satia Al-Husairi Dan Sutomo	JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 12 (2)	2012

B. Buku

Judul Buku	Penerbit	Tahun
Membumikan pendidikan akhlak mulia anak usia dini (Editor)	PT. Naskah Aceh Nusantara	2019
Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan	Ar-Raniry Press	2020
Filsafat Umum	Ar-Raniry Press	2020
Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas	Erhaka Utama	2020
Turnitin: Ethics in Islamic economics: microfoundations for an ethical endogeneity	Emerald Publishing Limited	2020
Hakikat Pembelajaran Sains dalam Inovasi Kurikulum Karakter	Sefa Bumi Persada	2019
Kompetensi Kinerja Guru Menurut Kurikulum Karakter (K-13)	Sefa Bumi Persada	2018
Konsep Manajemen Berbasis Sekolah	CV. SEFA BUMI PERSADA	2017

Banda Aceh,

DR. Drs. Tgk. H. Gunawan Adnan, M.A.,Ph.D